



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,
DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DIRJEN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN DIRJEN PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : Ke-14
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. 16.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Acara :
 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai bulan Mei 2023;
 2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing unit Eselon I.Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
19 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
 1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
4 dari 12 orang Anggota
 1. Ir. Sudjadi
 2. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 3. Sri Rahayu
 4. Harvey B. Malaihollo
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
4 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. Cen Sui Lan
 4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
1 dari 7 orang Anggota
1. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
1 dari 6 orang Anggota
1. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H.,
M.H.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
1 dari 6 orang Anggota
1. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
2 dari 5 orang Anggota
1. Willem Wandik
2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
3. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
4. KH. Toriq Hidayat, Lc.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
0 dari 4 orang Anggota
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa PDT Transmigrasi RI
(Sugito, S.Sos., M.H.),
2. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Desa PDT Transmigrasi RI
(Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si.),
3. Plt. Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Kementerian Desa PDT
Transmigrasi RI (Rafdinal, S.Sos., M.T.P.).

4. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT Transmigrasi RI (Ir. Danton Ginting Muthe, M.M.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan,
Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa (PDT) beserta seluruh jajarannya, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi V DPR RI, saat ini rapat Komisi V DPR RI telah diikuti sebanyak 19 orang Anggota dan fraksi terdiri dari 8 fraksi, sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), Rapat Komisi V DPR RI pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada para Dirjen Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dan rencana lokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggota apa anggaran K/L Tahun Anggaran 2024 masing-masing usulan unit Eselon I.

**Pimpinan, Anggota Komisi V, dan
Para Dirjen yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi pada hari Senin tanggal 20 Mei, 30 Mei 2023 yang lalu, telah disepakati berapa hal di antaranya: pagu indikatif Tanun Anggaran 2024 Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi adalah

sebesar 2,75 triliun. Dari alokasi pagu indikatif tersebut, alokasi anggaran untuk Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan adalah sebesar 162,21 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: sarana prasarana dan desa wisata, peningkatan kapasitas pelaku wisata dan program pendukung Prukades dan kegiatan ekonomi di desa dan pedesaan.

Selanjutnya, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan alokasi sebesar 224,68 miliar yang dipergunakan untuk kegiatan antara lain: pengembangan BUMDes bersama dan pengembangan kewirausahaan desa dan pedesaan daerah tertinggal dan transmigrasi, sedangkan Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal memperoleh sebesar 75,56 miliar yang akan dipergunakan antara lain: untuk mendukung kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan jalan desa strategis.

Kemudian Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mendapatkan alokasi sebesar 193,27 miliar yang akan mendukung untuk, yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: program dukungan manajemen dan program teknis dan perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi serta penggunaan kawasan transmigrasi. Sejalan dengan itu dalam kesempatan ini, kami tegaskan kembali agar tiap-tiap unit organisasi Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengan pendapat sampai dengan hari ini.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1. perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai prioritas penggunaan dana desa termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi dana desa;
2. dibutuhkan pengembangan produk unggulan desa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan fasilitasi pengelolaan BUMDes;
3. perlu kebijakan anggaran yang dapat memperluas peningkatan konektivitas serta sarana dan prasarana dasar di daerah tertinggal;
4. masih diperlukan penataan kawasan transmigrasi, fasilitas sertifikat tanah dan layanan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikian pengantar dari kami.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT untuk menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit Eselon I.

Kami persilakan. Mungkin Dirjen mana dulu ini? Dirjen Pembiayaan Desa dulu ya?

DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. HARLINA SULISTYORINI, M.Si):

Izin, Pak, sekaligus memperkenalkan dulu karena ada yang baru, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, silakan

DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. HARLINA SULISTYORINI, M.Si):

Baik.

Bapak dan Ibu, terima kasih.

Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi V, dan,
Para kolega kami dari Kementerian Desa,**

Izin, Pak sebelum memulai, karena memang ini ada yang, kemarin sempat diperkenalkan oleh Pak Menteri tapi kami izin untuk memperkenalkan kembali. Untuk Dirjen P2KTrans ini sekarang Pak Danton, Pak, beliau menjabat sebagai Dirjen P2KTrans. Kemudian untuk Dirjen PPDT, karena Pak Eko pensiun, purnatugas Plt-nya Bapak Rafdinal, Pak, dan Dirjen Pak Sugito yang tetap PDT.

Silakan dari Pak Sugito.

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom,

Om swastiastu,

Namo budaya,

Salam kebajikan,

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan Sidang Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati para Ketua, Wakil Ketua,**

**Para Anggota yang kami hormati pula,
Bapak-Ibu JPT Madya dan Pratama yang hadir,**

Izinkan kami untuk menyampaikan sebagaimana atensi dari Pimpinan sekaligus melaporkan dari realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan rencana program di tahun 2024. Penyerapan realisasi anggaran pada tahun 2023, walaupun tadi mohon maaf diminta per Mei, tapi kami laporkan per hari kemarin, pada saat ini adalah kami mencapai 30 koma, maaf saya akan laporkan dulu dari posisi awal dulu mohon izin. Pagu kami adalah Rp234.356.528.000,00 dengan rupiah murni di 186.473.108.000, kemudian dari pinjaman luar negerinya 40 miliar dari kegiatan P3PD dan hibah luar negeri dari kegiatan ini dalam rangka mendukung *stunting* ini adalah 7,8 miliar, terdistribusi kepada 6 unit kerja Eselon II yakni ada di Direktorat Sarana Prasarana 9,8, eh 98,2 miliar, kemudian di Direktorat Pengembangan Sosial Budaya di 58,9 miliar, Direktorat Advokasi Kerja Sama 6,8 miliar dan fasilitasi pemanfaatan dana desa di 5,1 miliar, kemudian di Direktorat Perencanaan Teknis 3,6 miliar dan Sekretariat 61,45 miliar.

Pada tahun 2023, kami ada *automatic adjustment* dengan total 29,78 miliar atau sekitar 12,71% dari anggaran pagu anggaran tahun 2023 sehingga dari 234,356 miliar tadi menjadi 204,577 miliar. Penyerapan sampai hari kemarin pada posisi di 30,48%, yakni di Sekretariat ini 50,79% kalau melihat dari pagu efektifnya, kemudian di daerah perencanaan teknis 45,8, di Sarpras 33,44% dan di Sosbud 15,68%, kemudian di Advokasi Kerja Sama 28,79 dan di fasilitasi pemantauan dana desa 29,47. Ini kami, yang kami laporkan adalah pagu efektif artinya di luar yang sedang di *automatic adjustment*.

Kemudian *progress* kegiatan kami laporkan untuk desa wisata dari 152 lokus, saat ini yang sudah mulai cair di tahap I, kami pencairan mulai dua tahap yakni 70% dan 30%, yang 70% sudah cair ini ada 82 desa, yang kemudian sedang berproses di pencairan artinya semua sudah lengkap tinggal pada posisi proses pencairan di KPPN ini adalah 20 desa dan 50 desanya proses dalam rangka pengumpulan data dukung untuk verifikasi lapangan.

Kemudian untuk peningkatan kapasitas pelaku wisata ini kena *automatic adjustment*, ini 750 juta ini kemudian di kegiatan pengembangan atau revitalisasi pasar desa yang pagunya 10,89 miliar ini kena *automatic adjustment* sehingga tinggal 800 juta, ini dilakukan untuk dua desa dan sudah satu desa yang lokus yang cair 70% dan satu desa dalam proses penyelesaian untuk verifikasi.

Kemudian untuk pengadaan sarana air bersih juga kena *automatic adjustment*, kemudian pengembangan potensi pariwisata terpadu dari 1,85 miliar yang kita sajikan 4 kawasan tinggal ada satu kawasan karena kena *automatic adjustment* yang saat ini sudah proses untuk penyelesaian atau penggunaan data dukung untuk proses MoU-nya.

Kemudian untuk pengembangan amenitas wisata dari pagu 4,5 miliar ini juga dapat kena *automatic adjustment* sehingga tinggal 600 juta yang dialokasikan dari delapan desa menjadi ke dua desa.

Kemudian pembangunan atau rehab jalan dari 6,7 miliar ini juga tinggal 3,32 miliar dengan awalnya target 6 kilo menjadi 3 kilometer untuk mendukung terkait dengan kawasan pedesaan.

Kemudian untuk kegiatan konvergensi penanganan percepatan atau pencegahan *stunting* di desa, ini dari PHLN 7,8 miliar dari total pagu efektif dari 10,2 ini kegiatannya adalah ini kaitannya dengan untuk sosialisasi termasuk untuk fasilitasi konvergensi *stunting* di desa, karena salah satu yang menjadi mandat dari Perpres 72 Tahun 2021 bahwa Kementerian Desa untuk mendukung atau mendorong desa berkinerja baik di dalam penanganan *stunting*.

Kemudian pengembangan kapasitas atau dana akuntabilitas sosial dari pengembangan desa inklusi mulai program P3PD, ini pagu dari 40 miliar dengan target 320 desa di 80 kabupaten, bentuk kegiatannya adalah pendampingan dan pengembangan percontohan desa inklusif. Ini saat ini sedang berproses, sudah jalan di lapangan dan sosialisasi maupun diseminasi.

Kemudian program bantuan yang lainnya ini kena *automatic adjustment* baik itu untuk pendukung pertanian, kemudian untuk pendukung ketahanan pangan dan sarana produksi, ini semua kena *automatic adjustment*.

Kemudian untuk peningkatan ke masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca bencana ini dari pagu 1,75 miliar dengan target 20 desa dengan bentuk kegiatan adalah peningkatan kapasitas terutama kepedulian ataupun mitigasi terhadap daerah-daerah yang berpotensi bencana melalui baik itu panduan desa peduli...

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan. Izin, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu, Silakan, Bu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Pak, mohon dijelaskan pagu efektif yang dimaksud itu apa tolong dijelaskan sekalian.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Baik, baik Ibu.

Maksud kami begini, jadi dari pagu katakanlah, pagu, kami ambil contoh yang, ya peningkatan kapasitas pariwisata tadi katakanlah pagunya 1 miliar ya, misalnya pagunya 750, karena kena *automatic adjustment* jadi anggaran ini

tidak bisa dicair, Bu, sehingga kami sampaikan pagu efektifnya nol. Nol itu artinya ini belum bisa dicairkan karena adanya *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan. Kalau misalnya tadi dari ada yang misalnya 750 tinggal 100 itu artinya yang boleh dicairkan kita yang 100-nya tadi. Jadi efektif itu artinya yang riil yang bisa kita kerjakan saat ini.

Izin, kami lanjutkan. Kemudian untuk advokasi dan pengembangan kerja sama desa dan pedesaan ini pagu 7,5 miliar ini adalah upaya dalam rangka untuk mendampingi dan mengadvokasi desa-desa yang terutama yang melakukan, di daerah-daerah yang Perhutani, kemudian di daerah tambang dan sebagainya yang untuk menegakkan kewenangan desa terkait dengan pengelolaan dan sebagainya ini perlu, perlu diadvokasi. Sekaligus melaporkan bahwa ini juga untuk mendukung karena Indonesia sebagian dari keketuaan ASEAN, di mana Kementerian Desa menjadi bagian dari ketuaan di SOMRDPE, yakni melalui kegiatan ASEAN *Village Network* yang tahun ini diinisiasi dan dipercayakan untuk Kemendesa sebagai vokal poinnya dan ini untuk sebagai ajang jaringan desa-desa di negara ASEAN. Kita dukung melalui kegiatan dari advokasi dan kerja sama. *InsyAllah* di bulan Juli nanti akan dilaksanakan untuk tahun pertama di Yogyakarta dengan tiga fokus yakni untuk *one village one product*, desa wisata dan desa digital.

Kemudian kegiatan untuk pengendalian penggunaan dana desa dengan pagu 5,17 miliar ini dengan target di 6 kegiatan, salah satunya adalah kegiatan tersebut untuk perumusan kebijakan terkait dengan pedoman ataupun prioritas penggunaan dana desa, baik itu melalui penyusunan produknya, sosialisasi sekaligus untuk melakukan koordinasi evaluasi dan monitoring.

Kemudian di kegiatan perencana teknis ini sebagai bagian acuan dalam perencanaan di seluruh unit kerja Eselon II dan sekaligus mengkoordinasikan dengan unit kerja Eselon I lain atau bahkan dengan eksternal, ini dengan pagu 3,67 miliar di mana setiap *output*-nya adalah 4 dokumen yang menjadi pedoman di 4 unit kerja Eselon II teknis di Dirjen PDP.

Kemudian dukungan manajemen 61,45 ini termasuk di dalamnya adalah gaji dan layanan terkait dengan operasional baik itu perkantoran maupun dukungan manajemen lainnya di tingkat ke keditjenan baik tadi yang ada di Eselon I maupun di Eselon II.

Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Memang ada beberapa tadi catatan permasalahan terkait dengan adanya *refocussing* tadi juga mempengaruhi terkait dengan pelaksanaan sehingga perlu penyesuaian. Kemudian terkait dengan bantuan desa wisata, kami sangat memahami dan terus berupaya untuk melakukan penyederhanaan terkait dengan Juknis, harapannya ada semakin ke depan semakin lebih simpel dan tanpa mengurangi dari sisi akuntabilitas. Namun, masih kita temui juga faktanya di lapangan memang ada hal-hal yang belum *clear* misalnya soal lahan dan sebagainya dan kami coba mencari eksisnya.

Kemudian untuk bantuan yang dari World Bank ini ada dengan adanya *No Objection Letter* atau NOL yang setiap pelaksanaan kegiatan ini juga memerlukan waktu sehingga perlu kami penyesuaian, sedang kegiatan yang lain masih dalam proses pelaksanaan. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mengoptimalkan dari berbagai kegiatan tadi mulai dari reformasi, penyesuaian target, lokasi dan alokasi untuk mendukung capaian kinerja sekaligus juga melakukan fasilitasi dan pendampingan di lapangan untuk percepatan bangunan data dukung termasuk mendengar masukan-masukan dalam upaya untuk efektivitasnya kegiatan.

Pimpinan, Bapak-Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Berikutnya, kami laporkan di pagu indikatif tahun 2024 di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan yakni Rp162.214.931.000,00, di mana kalau kita bandingkan di tahun 2023 dari pagu 234,3 miliar ini adalah turun 72 miliar atau sekitar 30% dari pagu tahun ini. Saya ulangi, turun 30% atau 72 miliar dari pagu tahun ini sehingga ini mungkin akan mempengaruhi penyesuaian kegiatan di tahun 2024.

Kemudian untuk anggaran *loan*, pertama menjadi 60 miliar untuk kegiatan dari P3PD. Adapun distribusinya untuk Direktorat Sarpras ini 32,4 miliar, Direktorat Sosbud 62,4 miliar, di Advokasi Kerja Sama 5 miliar, di fasilitas pemanfaatan dana desa 4,5 miliar, Direktorat Perencanaan teknis 3 miliar dan di SetDitjen termasuk di dalamnya adalah gaji, ini adalah 54,7 miliar. Sebenarnya terdapat yang kami usulkan di tahun 2024 ini adalah 601 miliar Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Rp601.224.792.000,00 sehingga sebenarnya terdapat *backlog*, ada Rp439.009.861.000,00. Dengan kondisi pagu indikatif tadi, kami mencoba merancang untuk kegiatan di tahun 2024, namun ini memang masih di tahap awal, mohon kiranya nanti masukkan, saran sekaligus penyempurnaan untuk kegiatan tahun 2024. Dengan pagu demikian tadi, untuk pengembangan objek wisata desa, ini kami alokasikan sementara adalah 13,3 miliar dengan target di 30 desa, saya yakin ini sangat sulit bagi kami dan kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian untuk bisa optimalnya ke depan.

Kemudian peningkatan kapasitas pelaku wisata dari pagunya 800 juta untuk target 120 orang untuk peningkatan kapasitas pelaku wisata atau pegiat wisata, utamanya adalah di desa-desa yang sudah kita bantu dengan bantuan Sarpas tadi.

Kemudian untuk pembangunan rehab jalan, peningkatan Prukades peningkatan ekonomi terutama di kawasan, ini adalah 1,5 miliar dengan target 1 kilometer. Kemudian pengembangan potensi pariwisata terpadu di kawasan pedesaan dengan pagu 800 juta, dengan target di dua kawasan pedesaan.

Kemudian pengembangan objek wisata di daerah tertinggal dengan pagu 1,6 miliar dengan target di 4 desa dan pengembangan revitalisasi pasar desa dan perdesaan 2,4 miliar dengan target di 600 desa.

Kemudian untuk pembangunan pengembangan rehabilitasi, permukiman di kawasan pedesaan ini 1 miliar dengan target di 2 kawasan karena kami punya 62 KPPN dan 30 dari kawasan pedesaan prioritas kementerian.

Kemudian untuk korban (*suara kurang jelas*) *stunting*, pagu 450 juta untuk target di 7 kelompok atau di 7 desa. Kemudian peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan maupun kebencanaan ini adalah 800 juta dengan target 250 orang, sedangkan untuk PHLN yang P3PD ini kan merupakan lanjutan dari kegiatan di tahun 2023 sebagaimana menjadi *road map*-nya dalam program penguatan pemerintahan dan pembangunan.

Kemudian ada kegiatan untuk kelompok masyarakat yang terutama untuk penguatan modal sosial, terutama untuk penanganan (*suara kurang jelas*) sosial ini atau pranata adat 150 juta. Di advokasi ini masih melanjutkan karena keketuaan ini di tahun 2023 kita juga masih fasilitasi terkait dengan SOMRDPE ini kegiatan ASEAN *Village Network* tadi termasuk pendampingan di daerah-daerah seperti yang katakan untuk perhutanan sosial dan tambang dan seterusnya ini 5 miliar dengan target di 250 desa.

Kemudian perencanaan teknis juga untuk mendukung dokumen perencanaan untuk di tahun 2025, 2026 nanti ini adalah 3 miliar dengan 4 dokumen dan pengendalian dana desa karena setiap tahunnya harus disusun terkait dengan kebijakan prioritas penggunaan dana desa. Dan yang terakhir adalah dukungan manajemen terkait termasuk gaji ini adalah 54,7 miliar.

Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian saya hormati,

Demikian yang dapat kami laporkan. Kami sangat mengharapkan masukan, saran sekaligus barangkali ada hal yang untuk menyempurnakan sehingga apa yang kita harapkan bersama-sama di tahun 2024 ini akan semakin efektif untuk pembangunan desa.

Terima kasih. Saya akhiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Sugito, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Ibu Ir. Harlina.

**DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. HARLINA
SULISTYORINI, M.Si):**

Siap, Pak.

KETUA RAPAT:

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, silakan Bu.

**DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. HARLINA
SULISTYORINI, M.Si):**

Terima kasih, Bapak

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi V dan seluruh Anggota Komisi V,
Bapak kolega kami di Kementerian Desa, Bapak Dirjen PDP, Dirjen
P2KTrans, dan Dirjen PPDT,
Bapak dan Ibu yang saya hormati,**

Izin pada kesempatan hari ini, kali ini saya akan melaporkan terkait
dengan dua hal: yang pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023 sampai
bulan Juni 2023 dan yang kedua terkait dengan rencana alokasi anggaran
menurut fungsi, program dan prioritas anggaran tahun 2024.

Yang pertama, yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun
2023, izin menyampaikan bahwa sesuai dengan target yang harus kami capai
di tahun 2023 adalah tercapainya jumlah BUMDes berkembang sebanyak
9.000, kemudian untuk BUMDes maju 1.450, sedangkan untuk BUMDesMa
berkembang 270 dan BUMDes Bersama maju 175, ini yang harus kami capai.
Sedangkan komposisi dan distribusi anggaran per jenis belanja tahun 2023,
total anggaran kami 230.459.248.000, dengan komposisi untuk belanja pegawai
13,22% dan belanja barang 86,78%. Sumber pendanaan ini berasal dari rupiah
murni dan PHLN, rupiah murni sebesar seratus lima puluh sembilan miliar dua
ratus tiga puluh delapan satu juta enam puluh delapan ribu, sedangkan PHLN
berjumlah 71.078.180.000, dengan distribusi per Eselon II nya untuk dukungan
manajemen atau SesDitjen sebesar lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh
enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu ribu.

Kemudian untuk Direktorat Perencanaan Teknis 4 miliar, Direktorat
Pengembangan Kelembagaan Ekonomi 84.682.477.000. Kemudian Direktorat
Pelayanan Investasi Desa sebesar 7 miliar, Direktorat Pengembangan Produk
Unggulan ini ada dari rupiah murni dan PHLN, totalnya sebesar 75 miliar dan
Direktorat promosi 6,5 miliar. Untuk realisasi terkait dengan penyerapan

anggaran dari masing-masing unit Eselon II, kami laporkan pada per tanggal 20 Juni untuk di lingkup Eselon I sebesar 29,70%, ini dengan pagu berdasarkan pagu awal, sedangkan kalau terkait dengan pagu efektif pembagiannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugito, pagu efektif, pagu yang bisa kami optimalkan atau kami manfaatkan adalah sebesar 32,68%.

Untuk sandingan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2023 ini dibandingkan tahun 2022, kami pada posisi yang sama di bulan Juni kita sudah berada di atas tahun kemarin. Jadi kami di sekarang 29,7% dengan deviasi 9,9, sedangkan tahun kemarin 19%. *Output* prioritas untuk kegiatan dari Direktorat Jenderal PEI tahun 2023 ini adalah terkait dengan bantuan pengembangan usaha BUMDes, kemudian bantuan pengembangan usaha BUMDes Bersama ini ada 68, sedangkan BUMDes ada 840 BUMDes, kemudian bantuan pengembangan BUMDes Bersama untuk *piloting* peternakan terpadu ini masih posisi blokir atau AA, kemudian bantuan kelompok usaha juga masih posisi blokir atau AA.

Kemudian bantuan pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, fasilitas kewirausahaan daerah desa, fasilitas investasi, kemudian peningkatan kapasitas masyarakat di pedesaan terkait nilai tambah dan juga ada kegiatan berasal dari PHLN adalah transformasi ekonomi kampung terpadu sebesar 71 M dengan lokasi di 1.110 desa.

Dan berikutnya adalah untuk perhutanan sosial, ini juga sebagian masih blokir di tiga daerah, kemudian promosi produk unggulan desa, kemudian kami juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan atau *men-support* kegiatan gerakan nasional bangga buatan Indonesia, yang untuk tahun ini akan diselenggarakan di Sulawesi Tenggara. Sedangkan bantuan yang lain adalah terkait dengan mendukung pengembangan desa ekspor.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Untuk selanjutnya, progres dari per unit Eselon II atau mungkin ini saya izin melaporkan yang terkait dengan Bapak dan Ibu ya ini terkait dengan BUMDes. Jadi dari total bantuan BUMDes 840 BUMDes ada 192, Bapak dan Ibu yang sudah terealisasi atau sudah bisa didapat dari masing-masing BUMDes-nya, bantuan kita sudah cairkan, kemudian 8 dalam proses pencairan dan 139 sedang proses buka blokir. Kami juga izin melaporkan bahwa dari 840 itu memang masih ada beberapa, ada beberapa BUMDes yang belum berbadan hukum sehingga ini kami terus berkoordinasi dengan tim Bapak dan Ibu TA untuk sama-sama memfasilitasi terkait dengan badan hukumnya.

Kemudian berikutnya terkait dengan badan usaha BUMDes Bersama, ada 68 BUMDes Bersama, ini sedang tahap pemenuhan kelengkapan dokumen.

Yang berikutnya adalah terkait dengan fasilitasi pengembangan kewirausahaan ini masih blokir, sedangkan untuk yang kegiatan

pengembangan, kewirausahaannya, bantuannya kita juga sedang proses persiapan dokumen.

Berikutnya untuk Direktorat Pengembangan Produk Unggulan, kita tadi seperti yang sudah saya laporkan ada kegiatan pengembangan program transformasi ekonomi kampung terpadu, ada di 1.110 desa di Tanah Papua, Maluku, Maluku Utara dan NTT, ini adalah kegiatan PHLN dan untuk buka blokir kita sudah melaksanakan beberapa dokumen-dokumen untuk melengkapi.

Kemudian untuk yang Direktur Promosi, kita sedang proses untuk penyiapan *men-support* promosi produk unggulan desa melalui Gernas BBI dan pengembangan desa ekspor.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Kami izin juga melaporkan terkait dengan *progress database* badan usaha milik desa yang masuk di aplikasi kami bahwa posisi per hari ini sudah ada 48.879 BUMDes yang terbentuk dan yang sudah berbadan hukum sebanyak 14.202, sedangkan untuk BUMDes Bersama sudah ada 2.887 BUMDes Bersama yang terbentuk yang sudah berbadan hukum 201, sedangkan BUMDes Bersama LKD ini adalah SPNPN mandiri, sudah ada 2.144 yang sudah berbadan hukum 1.013.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Izin, untuk 2024 melaporkan bahwa kami targetnya di 2024, kami harus bisa mewujudkan BUMDes berkembang sebanyak 10.000, kemudian BUMDes maju 1.800, BUMDes Bersama berkembang 300 dan BUMDes Bersama maju 200. Komposisi untuk angka dan distribusi anggaran, kami juga ada pengurangan dari 230 miliar tahun ini kita berada di angka 224.688.993.000, dengan rupiah murni sebesar 92.688.993.000 dan dari hibah PHLN sebesar 131 miliar, dengan pembagian atau dengan komposisi per Eselon II, ini adalah sebagai berikut: kami juga izin melaporkan bahwa sebetulnya pagu kebutuhan kami adalah 503 miliar, tapi kami pagu indikatifnya adalah sebesar, pagu indikatifnya maaf, pagu indikatifnya 224,688 miliar. Jadi artinya kami masih ada *backlog* 278.491.567.000. Peruntukannya sebetulnya hampir sama dengan tahun ini, kami prioritas lebih banyak bagaimana kami harus menguatkan BUMDes, BUMDes Bersama, penguatan desa ekspor dan fasilitasi investasi juga fasilitas promosi dan kewirausahaan.

Demikian Bapak Ketua dan Bapak-Ibu semua dari Komisi V. Kami mohon masukan, saran dan kemudian juga kami akan menindaklanjuti apa yang kita dapat arahan dari Bapak dan Ibu semua.

Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Selanjutnya Pak Rafdinal, Plt. Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

**Plt. DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (RAFDINAL, S.Sos., M.T.P):**

Baik.

Bapak dan Ibu.

Bismillahirrahmanirahim.

**Yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan Bapak Ketua dan anggota Komisi V DPR RI,
Bapak-Ibu Dirjen dan jajaran Kementerian Desa PDT Transmigrasi,**

Pada kesempatan ini kami akan melaporkan dua *progress* kegiatan, pertama evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 ini, kemudian juga selanjutnya kami akan menyampaikan rencana kerja Ditjen PPDT sesuai dengan SBPI Tahun Anggaran 2024, jadi surat bersama pagu indikatif 2024. *Next* saja.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Atas arahan Pak ketua tadi ada yang saya catat tadi, ada kebijakan anggaran ya, untuk peningkatan konektivitas sarana prasarana di daerah tertinggal. Ini sebenarnya kalau kita hubungkan dengan alokasi anggaran Ditjen PPDT di tahun 2023 ini, bahwa kami mendapatkan anggaran Rp90.564.634.000,00, dan lagu efektifnya adalah sebesar Rp70.259.175.000,00 atau sebesar 77,58%, dan blokir atau *automatic adjustment* sebesar 22,40% atau sekitar 20,305 miliar.

Selanjutnya, komposisi anggaran per jenis belanja saat ini, kita bagi atas anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan belanja barang itu kita bagi atas belanja operasional dan operasional, non operasional. Di saat ini untuk operasional sebesar 9.347.662.000 atau 21% dan non operasional sebesar 34.594.374.000 atau 79%.

Selanjutnya, kami perlu melaporkan pada Bapak dan Ibu yang kami hormati di pertemuan yang sangat, yang sangat strategis ini, *progress* ya, pelaksanaan kegiatan prioritas Ditjen PPDT atau *output* di Tahun Anggaran 2023. Masing-masing direktorat, yaitu Direktorat Penyelesaian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pagu efektifnya adalah sebesar 1,34 miliar dari pagu awalnya 1,45 miliar. Di sini kami sudah melakukan semacam penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan percepatan

pembangunan daerah tertinggal mulai melaksanakan evaluasi rencana aksi nasional PPDT 2022. Ini adalah semacam dukungan kementerian/lembaga untuk program intervensi program kegiatan di 62 kabupaten daerah tertinggal.

Kemudian untuk pada saat ini kita sudah melaksanakan juga pemantauan rencana aksi nasional PPDT berdasarkan Keppres 27/2022 tentang Rencana Aksi Nasional PPDT, dan saat ini kita sedang melakukan tahap finalisasi dan penetapan Keppres Stranas PPDT 2024.

Selanjutnya, untuk Direktorat Penyelesaian Sarana Prasarana ya, kegiatan kami sebenarnya dengan keterbatasan anggaran, kami lebih banyak mendorong kegiatan pada *pilot project* yang mungkin tidak seluruh kabupaten bisa mendapatkan, *gitu*. Jadi kita sudah mengidentifikasi ternyata kita pilih satu atau dua atau tiga kabupaten yang nilai indeks kompositnya sudah mencapai daerah tertinggal entas nantinya. Jadi untuk itu kita melakukan kegiatan pembangunan sarana prasarana air bersih dari pagu 3,4 miliar dan pagu efektifnya 1,27 miliar yaitu di Kabupaten Sumba Tengah 1 unit, kemudian dari dana 1,18 miliar untuk penyediaan sarana dan prasarana rumah produksi Prukades itu masuk *automatic adjustment*, *automatic adjustment* maaf. Kemudian untuk *pilot project* pengembangan internet desa berbasis komunitas dilaksanakan rencananya di dua kabupaten karena AA ini maka pagu efektifnya 397 juta dilaksanakan di Kepulauan Sula dan 1,3 miliar dari pagu semula maka pagu efektifnya 700 juta, penyediaan sarana prasarana rumah produksi kopra putih di Kabupaten Sula, ini sudah berproses 70% untuk pencairan termin pertama.

Selanjutnya, untuk Direktorat Penyelesaian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal, dari pagu 1,05 miliar, pagu saat ini yang tidak masuk dalam *automatic adjustment* itu yaitu 773 juta, kita laksanakan peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang pendidikan dan pemberian sarana penunjang kegiatan pembelajaran ya, di Kabupaten Keerom sudah berjalan 100%, Manggarai Timur dan Lombok Utara sudah 70% dan pusat kontrak dan Pesisir Barat bisa, belum bisa kita lakukan karena masuk pada AA itu, Pak.

Kemudian kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang kesehatan dalam upaya pencegahan *stunting* dan pemberian *auto promote kids* ya, dilaksanakan di, berproses masih 57% *gitu*, Pak.

Kemudian untuk pagu efektif peningkatan kapasitas masyarakat bidang kesehatan dan KB dilaksanakan di Keerom, itu sudah 100% itu berproses 50%. Selanjutnya, untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang ekonomi dan pemberian sarana prasarana pengolahan komoditas dilaksanakan di Musi Rawas Utara Kabupaten Belu dan Rotendao itu sudah selesai 100% dan Donggala masih 50%. Kemudian Alor dan Teluk Bintuni masih kena *automatic adjustment*.

Kemudian selanjutnya Direktorat Penyelesaian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal dari pagu 1,97 miliar maka pagu

efektifnya 881 juta, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir, pengembangan produk turunan di Kabupaten Manokwari Selatan, Teluk Bintuni dan silvopastura dalam revitalisasi dilaksanakan di Pesisir Barat olahan hasil laut dan pengolahan berbasis komunitas di Pesisir Barat di Lampung. Ini sedang berproses dan kegiatan proses masih dapat dilakukan setelah pengadaan alat stimulan selesai dilakukan dan ini sehubungan dengan itu, pemberian stimulan pengelolaan pengawasan pesisir yang pagu efektifnya 1,25 miliar, pengembangan produk turunan Manokwari Selatan, Teluk Bintuni dan silvopastura dan dalam revitalisasi di Kabupaten Pesisir Barat untuk olahan hasil laut ini sudah berproses, sudah pencarian tahap pertama 70% dan *Insyallah* dalam waktu dekat ini, kita akan sampaikan ya untuk 100%-nya sehingga bisa kita dimanfaatkan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas yang kami sampaikan tadi.

Selanjutnya, untuk Direktorat Penyelesaian Pembangunan Daerah Khusus ya, ada total anggaran 878 juta untuk *workshop* diversifikasi produk turunan sagu dan ketahanan pangan, dilaksanakan di Sorong ya, Keerom dan Pulau Taliabu, ini progresnya masih 21%. Untuk *workshop* pengelolaan, pemasaran dan digitalisasi desa wisata di pulau kecil terluar sebesar 510 juta, ini di Donggala sudah 96,78% dan Rote Ndao sudah 100%.

Selanjutnya kegiatan pembangunan prasarana amenities dan atraksi desa wisata di pulau kecil terluar, itu di Kabupaten Donggala 70% sudah pelaksanaan pekerjaan dan Kepulauan Aru sudah 70% dengan masing-masing anggaran 210 juta.

Kemudian, selanjutnya kegiatan pengadaan alat pengolahan sagu mendukung *green ekonomi growth* ya, dilaksanakan di daerah Papua sana, sebesar 250 juta. Untuk ini proses masih 0% sedang proses pengajuan *e-katalog*, kita akan dorong segera mungkin untuk bisa percepatan. Kemudian untuk pengadaan-pengadaan alat pengolahan sagu di Pulau Pesisir terluar di Kepulauan Sula, proses pengkajian masih pakai *e-katalog*.

Selanjutnya, untuk kegiatan ya, pembangunan jalan desa strategis perbatasan amanat Inpres 1/2001 ini masih di-bintang. Kemudian pengadaan alat pengolahan rumput laut pendukung *green ekonomi growth* di Teluk Wondama akan kita proses untuk kegiatan melalui *e-katalog*. Kemudian pengadaan alat pengolahan rumput laut di pulau kecil terluar masih di-bintang begitu juga untuk pembangunan embung di perbatasan amanat Inpres Nomor 1/ 2021 baru kita laksanakan di Kabupaten Belu *gitu*, Pak, yang satu lagi masih dalam kondisi bintang.

Bapak Ketua, Bapak Anggota Komisi V yang kami hormati dan kami muliakan,

Progress serapan anggaran 2023 hingga semester I per tanggal 20 Juni 2023, data OM-SPAM, untuk SesDitjen PPDT dari total pagu 50.891.896.000 itu sudah realisasi 47,21%. Kemudian Direktorat Penyerasian Rencana dan

Program Ditjen PPDT dari total pagu 3 miliar sudah terealisasi 35,47 miliar, mohon maaf 35,47%. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal dari total pagu 7,65 miliar, realisasi 32,46%. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal dari total pagu Rp8.722.764.000,00 baru realisasi 13,7%, karena ada yang sedang di-blok dan masih proses diproses dilelang *gitu*, Pak.

Kemudian yang kelima Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal, pagu, pagunya adalah Rp7.700.000.000,00 dan saat ini sudah realisasi 23,56%. Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus dari total pagu 12 koma, 12.600.000.000, saat ini realisasi masih 16,15% dan jumlah di-blok hampir sebagian atau 6 miliar.

Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami muliakan, *next* saja, kurva S, serapan anggaran sesuai dengan halaman 3 DIPA, rencana penggunaan dana, saat ini di bulan Juni total target adalah 39,90% dan saat ini deviasinya angka 3,88%, ini akan kita dorong sampai akhir Juni ini sehingga deviasinya kurang dari 1% nantinya, Pak, kita rencanakan itu.

Next saja, ini rekap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui tender ya, saya rasa ini ada 9 paket dengan total pagu di SiRUP itu adalah Rp10.040.680.000,00, 3 paket sudah masuk di UKPPJ dan satu paket di-*review* oleh KPPJ dan proses tender seleksi sudah berlangsung satu paket dan selesai satu paket.

Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami menghormati,

Direktorat Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana, dari 3 kegiatan fisik: satu, kegiatan pembangunan prasarana air bersih di Kabupaten Sumba ini masih proses dilelang *gitu*, Pak, dan dua kegiatan masih di-bintang.

Kemudian Direktorat Penyelesaian Daerah Khusus, paket *fullboard* dan pengadaan alat pengolahan sagu di daerah pulau kecil terluar dan pulau dan pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Sula, ini masih dalam proses dan kegiatan *fullboard*-nya sudah 100%, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan.

Selanjutnya, ada kegiatan pembangunan peningkatan jalan yang diblokir yang kami laporkan tadi dan saat ini sedang proses lelang ya, masih masa sanggah, pembangunan embung di kawasan perbatasan di Kabupaten Belu. Kemudian untuk pembuatan embung di kawasan, di Kabupaten Belu juga masih ada kegiatan diblokir dan kemungkinan ini masih proses untuk pembukaan blokir Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan.

Jadi itu yang perlu kami lapor kepada kita semua dan kegiatan kontraktual berjalan di Tahun Anggaran '23 di SesDitjen PPDT, ya saya rasa ini mohon izin saya *skip* saja Bapak dan Ibu, tidak usah saya bacakan satu persatu

untuk menyingkat waktu karena pada dasarnya sudah tertulis semuanya Bapak dan Ibu.

Kendala serta solusi dan pelaksanaan anggaran, lanjut itu blokir *automatic adjustment, adjustment* yang membuat presentase penyerapan terhadap pagu total menjadi kecil. Solusinya tentu menunggu kebijakan untuk pembukaan blokir AA yang mana memerlukan surat Menteri Desa pada Menteri Keuangan ini, *alhamdulillah* ini sudah, informasi sudah berlangsung Bapak dan Ibu. Upaya optimalisasi pelaksanaan anggaran menjaga frekuensi *revolving GUP* agar tetap memenuhi aturan yang berlaku yakni minimal 1 bulan sekali dan memenuhi ketentuan presentasi GUP yang disetarakan dalam satu bulan dan menyegerakan penyelesaian pekerjaan kontraktual yang sudah di-*input* data kontraknya pada KPPN agar dapat dilakukan pencairan dan termasuk mempedomani rencana penarikan dana bulanan operasional pencairan anggaran.

Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati dan kami muliakan,

Selanjutnya, kami akan melaporkan rencana kerja Ditjen PPDT, SBPI Tahun Anggaran 2024 yang akan datang. Total pagu anggaran kami di tahun 2024 yang akan datang seperti yang disampaikan oleh Pak dan Ibu Dirjen yang terdahulu bahwa terjadi pengurangan, saat ini di Ditjen PPDT 2024 di SBPI sekitar Rp75.564.996.000,00 dan pagu kebutuhan sebenarnya totalnya kita sudah menghitung bersama-sama dengan teman-teman SesDirjen PDT dan para direktur, yaitu Rp296.263.131.000,00 jadi ada *backlog* sekitar Rp220.698.135.000,00.

Next, lanjutnya kami perlu laporkan *progress* pelaksanaan kegiatan prioritas rencana kegiatan 2024. Direktorat Penyelesaian Rencana dan Program dengan total pagu 2,59 miliar penyusunan dokumen perencanaan kebijakan PPDT, ini yang bisa mengkonsolidasikan daerah ya, untuk melakukan afirmasi dan fokus kepada kriteria dan indikator yang bermasalah sehingga kita bisa dorong target RPJMN 25 daerah tertinggal bisa kita entaskan di tahun 2024, termasuk juga target untuk presentasi penduduk miskin, minimal di tahun 2024 yang akan datang ya 24% bagi rata-rata untuk daerah tertinggal bisa kita capai.

Kemudian juga target IPM/Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan RPJMN 2020-2024, bisa kita capai angka 62,2 sampai 62,7 di tahun 2024. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, saat ini angka IPM kita rata-rata sudah mencapai 72 sekian, kita untuk 2024 yang akan datang untuk rata-rata daerah tertinggal 62,2 berarti ada kesenjangan sepuluh koma sekian poin itu, maka koordinasi ini sangat kita perlukan dan termasuk juga koordinasi penyerasian rencana program ya, asistensi penyusunan strategi daerah dan RAD di daerah tertinggal, supaya apa? rencana aksi nasional yang dari kementerian/lembaga keroyokan itu betul-betul didukung oleh belanja kabupaten daerah tertinggal dan provinsi yang menjadi daerah tertinggal.

Kemudian juga kita melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan PPDT dan untuk kajian reformulasi kriteria dan indikator daerah tertinggal untuk RPJPN dan RPJMN 2025 sampai 2029 sebagai pengganti atau revisi PP 78/2014 tentang PPDT sesuai hasil *review* di tahun 2023 ini.

Kemudian selanjutnya, *progress* pelaksanaan untuk Direktorat Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal, 2,8 miliar nya dilaksanakan pembangunan air bersih yaitu di 2 unit di Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur.

Kemudian untuk koordinasi penyelesaian bidang sarana dan prasarana, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan monitoring, kita melaksanakan memakai dan mengalokasikan anggaran 2,289 (*suara kurang jelas*) khusus untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana untuk daerah tertinggal. Untuk Direktorat Penyelesaian Pembangunan Sosial Budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal, total pagu 1,3 miliar dilaksanakan kegiatan koordinasi perumusan kebijakan bidang pembangunan sosial budaya dan kelembagaan di daerah tertinggal dan 1,6 miliar nya koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga daerah masyarakat bidang sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal, dan 900 juta dilaksanakan untuk monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga daerah dan masyarakat bidang pembangunan sosial budaya sehingga betul-betul sinergi dan mencapai sasaran target yang sudah ditetapkan di Stranas dan RPJMN.

Kemudian Direktorat Penyelesaian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 202 juta didasarkan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Sabu Raijua, 197 juta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Kupang, 620 juta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di 3 kelompok masyarakat di Kepulauan Sula, Lombok Utara dan Pesisir Barat. 1,1 miliar budidaya lahan dalam mendukung pengembangan perhutanan sosial di daerah tertinggal, total targetnya 60 hektar di Kepulauan Sula, Lombok Utara dan Pesisir Barat, 326 juta rehabilitasi lahan dalam pembuatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang kita alokasikan di 10 hektar di Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian 402 juta pemberian bantuan stimulan dalam pengolahan kawasan pesisir di Kabupaten Kupang dan 1,2 miliar *pilot project* sarana pengembangan perhutanan sosial di daerah tertinggal di Kabupaten Sula, Lombok Utara dan Pesisir Barat, dan 900 juta kita laksanakan untuk koordinasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam dan adaptasi iklim.

Selanjutnya, kami laporkan juga untuk Direktorat Penyelesaian Pembangunan Daerah Khusus, 934 juta, penyusunan dokumen *exit to exist* strategi dalam rangka penyiapan kebijakan pembangunan daerah khusus karena RPJMN berakhir, tentu kita harus menyiapkan apa rencana skenario kita untuk ke depannya. Kemudian 289 juta *workshop* pengelolaan desa wisata di kawasan perbatasan dan di daerah pulau kecil terluar di Kupang. 286 juta *workshop* peningkatan perekonomian desa melalui *one village one product* di kawasan perbatasan di Malaka. 1,79 miliar pembangunan embung di kawasan

perbatasan yaitu di Kabupaten Alor. 973 juta pembangunan sarana amenities atraksi wisata di pulau kecil terluar dan pulau terluar di dua unit yaitu Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Lombok Utara. 377 juta pembangunan sarana elektrifikasi di kawasan perbatasan yaitu di Kepulauan Aru dan 2,1 miliar koordinasi bidang pembangunan daerah khusus di daerah tertinggal.

Demikian Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Anggota yang kami muliakan atas rencana dan pelaksanaan di tahun 2023 ini. Kami mohon arahan, masukan untuk penyempurnaan sehingga ke depannya apa-apa yang kita dilaksanakan bisa efektif dan tentu berdampak sistemis.

Demikian.

*Wabillahitaufik walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini Pak Danton Ginting teman saya ini, jadi saya kasih paparan terbelakang dia tadi. Biar jadi penutup.

Silakan, Pak Ginting.

**DIRJEN PERMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI
(Ir. DANTON GINTING, M.M.):**

Terima kasih, Pak.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita sekalian,*

**Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Pimpinan dan segenap Anggota
Komisi,
Bapak-Ibu Dirjen serta para JPT Pratama, dan
Hadirin sekalian,**

Izin melaporkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, serta rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Tahun Anggaran 2024.

Langsung ke pagu Ditjen PPKTrans Tahun Anggaran 2023, tahun ini Ditjen PPKTrans, Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan total pagu Rp251.553.559.000,00 terbagi Program

Dukman 77.500.000.000 serta Program Teknis 174.053.559.000 yang disebar lagi di dalam 5 direktorat, pertama Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 6,6 miliar, kemudian Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi 60.189.998.000, Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi 24,8 miliar, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan 44,6 miliar, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi 37,6 miliar. Kami laporkan dalam tahun ini terdapat *automatic adjustment* (AA) sebesar 22,15% atau 55.716.586.000 sehingga pagu efektifnya 195.926.579.000 atau 77,85%.

Distribusi anggaran per jenis belanja. Untuk belanja modal sebesar 6,54% atau 16,4 miliar, untuk belanja pegawai sebesar 15,93% atau Rp40.078.509.000,00, untuk belanja barang 77,53% atau 195.019.417.000. Pembagian anggaran untuk Satker-Satker yang membidangi ketransmigrasian untuk daerah sebesar 55,43% itu untuk provinsi dan Satker di kabupaten atau 139.447.554.000, sedangkan untuk alokasi anggaran di Satker pusat 44,57% atau 112.106.005.000. Kami laporkan jumlah Satker di pusat maupun daerah sebanyak 79 satuan kerja, baik provinsi maupun kabupaten. Kami laporkan untuk realisasi anggaran pada saat tanggal kami sampaikan laporan realisasi keuangan sebesar Rp62.632.701.813,00 atau 24,90%, realisasi tanpa blokir sebesar 31,98%. Posisi hari ini izin menambahkan Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota, posisi hari ini 25,26% atau realisasi tanpa blokir sebesar 32,45%. Untuk pusat, realisasinya 39% sebesar Rp43.719.664.761,00. Kemudian di daerah 13,56% atau Rp18.913.037.052,00. Sedikit izin menambahkan memang realisasi di Satker daerah baik provinsi maupun kabupaten masih rendah karena memang baru pada akhir bulan Maret dan awal April, kita melakukan proses buka bintang atau buka blokir untuk semua Satker daerah dan sekarang sudah bergerak *progress* dari 78 satuan kerja, sudah bergerak proses dan mudah-mudahan pencapaian satu bulan, dua bulan ke depan melonjak.

Outstanding kontrak sebesar Rp17.297.885.218,00 sehingga berdasarkan pagu total, sisa anggaran yang masih tersedia sebanyak Rp115.906.385.969,00 tapi apabila dikeluarkan *automatic adjustment* hanya sebesar 50 miliar 755,7 miliar. Realisasi berdasarkan unit kerja untuk program dukungan manajemen sebesar 48,23%, untuk Program Teknis baru mencapai 14,49% di mana kami laporkan untuk Direktorat P2KT 25,84%, untuk Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi 12,02%, Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi 19,8%, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan 12,73% dan Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar 15,37%. Kami laporkan target dan realisasi output tahun 2023, untuk sarana perumahan yang dibangun di dalam kawasan transmigrasi dari target 200 tapi setelah dikenakan AA, sisa 120 unit saja. *Nah*, ini memang baru bergerak setelah dibuka bintang, buka blokir, realisasi baru 3 unit. Untuk SAB dari target 34, realisasi baru 2, memang ini sama permasalahannya.

Kemudian untuk fasilitas umum di kawasan transmigrasi target 42, ini masih proses dan bangunan air di kawasan transmigrasi target 1 unit masih proses. Jalan dari target 73,9 baru realisasi 2,97 kilometer, jembatan 263,2

realisasi 12,25 meter, drainase target 10,6 kilometer, realisasi 4,97. Pengadaan catu pangan untuk transmigran target 859 kepala keluarga termasuk untuk UPT-UPT bina, realisasi 674 kepala keluarga, fasilitasi pengurusan SKHPL, target di 13 lokasi di daerah, realisasi baru 2 SKHPL, sarana produksi target 37 di satuan permukiman realisasi baru 71 permukiman. Persebaran dan penempatan transmigran belum ada dari target 207 kepala keluarga, ini sebelum diblokir, ini kita rencanakan baru paling cepat bulan September, Bapak. Jadi memang realisasinya belum ada, setelah permukiman selesai baru kita lakukan persebaran dan penempatan transmigran.

Kemudian pengadaan bantuan peralatan pasca panen target di 11 lokasi, masih proses dan fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik untuk 2.489 sertifikat, masih proses. Kami laporkan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Tahun Anggaran 2024, pagu Ditjen PPKTrans tahun 2024, berdasarkan pagu indikatif. Program Dukman 74,4, program teknis 118.796.745.000, total 193.270.954.000, mengalami memang penurunan dari tahun anggaran ini sebesar 23,17% atau 58 miliar, 58,2 miliar. Sementara berdasarkan kebutuhan yang bisa kami usulkan sebesar 675.709.377.000, sehingga ada selisih atau *backlog* sebesar 482.438.423.000.

Kami laporkan rancangan *output* prioritas tahun 2024 berdasarkan pagu indikatif. Yang pertama, sarana perumahan masih sama dengan sekarang, 120 unit setelah dikeluarkan *automatic adjustment*, sekarang juga setelah dikeluarkan 120 unit. Sarana air bersih 4,4 miliar sebanyak 18 unit, FU atau Fasilitas Umum 11 unit sebesar 8,2 miliar, jalan 41,4 kilometer sebesar 25,4 miliar, jembatan 125,2 miliar *eh* maaf, mohon maaf 125,2 meter atau 7,8 miliar, drainase 4,3 kilometer atau 1,8 miliar, fasilitasi pengurusan SKHPL di 12 lokasi di daerah 1 miliar, pengadaan sarana produksi 31 unit sebesar 6 miliar, pengadaan bantuan peralatan paska panen di 8 satuan permukiman sebesar 1,2 miliar, bangunan air 53 unit sebesar 837 juta, pengadaan catu pangan 331 kepala keluarga atau 4,7 miliar, fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik untuk 540 KK sebesar 1,5 miliar, serta persebaran dan penempatan transmigran 120 kepala keluarga sebesar 10,6 miliar.

Demikian, Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V yang bisa kami laporkan. Mohon arahan masukannya kepada kami.

Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Danton.

Dengan selesainya empat Dirjen menyampaikan paparannya maka sekarang sampailah kepada teman-teman kita, Komisi V untuk melakukan pendalaman-pendalaman.

Pertama Bu Sri Rahayu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Dirjen semuanya dan Ibu yang saya hormati.**

Sebenarnya kita ini sedih juga melihat anggaran semua yang ada di Kemendes ini, dengan harapan bahwa Republik ini akan kelihatan, akan dinilai maju salah satu indikatornya adalah apabila desa itu maju. Oleh karena itu, sebenarnya ini merupakan satu tugas yang tidak ringan bagi Bapak-Ibu sekalian di Kementerian Desa, tetapi realitanya tidak demikian.

Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa tolong Bapak-Ibu sekalian, kalau saya perhatikan, saya lihat satu persatu, program-program dari Bapak-Bapak ini ada banyak yang sama, misalnya kebutuhan air bersih ini setiap ini, setiap Dirjen ada, meskipun ada yang di tempat transmigrasi, ada yang daerah tertinggal dan seterusnya. Di sisi lain, di PUPR itu ada sumber daya air yang mempunyai tugas untuk itu, antara lain juga membuat embung. kalau di sini tadi embung itu kan cuman berapa M gitu ya Pak ya, itu artinya kan kecil sekali begitu, hanya sekedar ada, kalau hanya sekedar ada itu artinya fungsinya juga kurang optimal untuk hal tersebut. Maksud saya, tidakkah pernah ada komunikasi ketika rapat dengan kementerian yang lain mungkin dalam rapat apapun, koordinasi apapun untuk hal tersebut *gitu loh*, untuk ini supaya dikerjakan oleh PUPR, ini yang kita, kita sebagai pengusul dan seterusnya, apakah itu tidak memungkinkan untuk itu.

Kemudian yang kedua, ini kan banyak yang di-*adjustment* AA itu ya, Pak ya. Yang saya maksud dengan introspeksi coba, apakah program-program ini memang dibutuhkan apa *enggak*? apakah hanya karena ini ruang lingkungannya kemudian membuat seperti yang saya sampaikan tadi, mestinya kan program-program yang di-*adjustment* itu kan kemungkinan dianggap kurang begitu prioritas, bukan bermanfaat, tetapi prioritas, karena mungkin juga dikerjakan di tempat lain, seperti embung tadi, kemudian jembatan, jalan, apakah ini juga memang tugas dari Kemendes, *gitu*? Jadi maksud saya supaya tidak di-*adjustment* *gitu loh*, ininya, program-program yang Bapak sudah nyusun begitu, mungkin berhari-hari *njelimet* istilahnya ya, melihat satu persatu, tetapi pada kenyataannya tidak diberikan anggaran.

Selanjutnya, saya ke Pak Dirjen PPKT Transmigrasi ya. Tadi kan anggarannya juga cukup, sebenarnya kalau dilihat dari yang lain-lain agak besar juga *gitu*. Saya ingin tanya, Pak, saya hanya mencermati sebagian dari tabel yang Bapak sajikan, itu antara lain, *ndak* ada halamannya ya, di tabel itu pada

nomor 133, di Aceh ya, itu di UPT Sigulai, Desa kawasan lokasinya, kemudian menu kegiatannya adalah RTJK, saya *enggak* ngerti RTJK ini kepanjangan apa Pak?

DIRJEN PERMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. DANTON GINTING, M.M.):

Izin Ibu, RTJK (Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga).

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Rumah.

DIRJEN PERMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. DANTON GINTING, M.M.):

Rumah Transmigran.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Rumah tinggal.

DIRJEN PERMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. DANTON GINTING, M.M.):

Transmigran.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Oh, Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga. *Nah*, itu kan di bawahnya juga ada 10 unit, kemudian 10 unit di bawahnya ada tapi *enggak* sama angkanya. Ini saya minta penjelasan ini, satunya 10, 10 itu 700, satunya 350. Apakah memang ada perbedaan?

Demikian juga di bawahnya ada nomor 14, 7148 itu TPP juga, itu ada 10 hektar, ada, kenapa *kok* sendiri-sendiri *gitu* maksudnya, sama-sama apakah ini jumlahnya tidak bisa disatukan atau seperti apa karena ada kriteria-kriteria yang lain dan itu banyak hal lain yang seperti itu, tolong saya diberikan penjelasan, karena kawasan transmigrasi ini menurut saya juga perlu karena banyaknya transmigrasi tetapi ininya masih kurang juga, penanganan dalam arti untuk bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk menuju yang lebih baik.

Pertanyaan yang terakhir dari Pak Dirjen Transmigrasi, sampai hari ini sebenarnya masih perlukah transmigrasi itu? kalau masih, apa alasannya? saya mohon diberikan penjelasan.

Kemudian yang kedua, dari Pak PPDT, pertanyaan yang sama tadi sudah saya sampaikan, yang pertama artinya kita introspeksi, apakah memang itu perlu ada kegiatan itu? Seperti misalnya, Pak, ini juga ada pembangunan sarana air bersih, ini juga ada, angkanya juga cukup lumayan, progresnya masih 0%, pagu efektif 1,27, artinya ini baru *separo loh*, yang lain kan berarti kena AA ini ya, mudah-mudahan nggak kena ini, ini kan menjadi apa, pertimbangan juga ketika membuat anggaran, supaya tidak di *adjustment, gitu*. Demikian juga *stunting* misalnya, *stunting* itu kan juga menjadi program secara keseluruhan. Apakah di desa tertinggal ataupun daerah yang miskin itu tidak mendapatkan anggaran ataupun perhatian dari misalkan Kementerian Kesehatan, kemudian perumahan, itu apakah tidak memberikan perhatian terhadap hal tersebut, terutama kesehatan, mungkin juga BKKBN, sehingga Kemendes ini juga mempunyai anggaran tersendiri yang mungkin kalau saya lihat tadi juga hampir, hampir sama ininya, apa, apa, program-programnya. Maksud saya supaya itu dilihat secara cermat, sehingga anggaran yang sedikit ini tidak di-*adjustment* gitu, Pak, maksudnya. Makanya tadi minta untuk semuanya.

Selanjutnya yang, Ibu ya, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, oke, BUMDes, investasi ya, ekonomi dan investasi desa. Ibu, saya ingin, ingin tahu, sampai sejauhmana sekarang ini PNPM yang kemarin diminta untuk melebur ke BUMDesMa, ini perkembangannya seperti apa? Lalu yang sudah melebur dalam, bukan melebur ya istilahnya, bergabung ya, bergabung itu berapa dan yang tidak mau berapa? lalu yang tidak mau ini apa yang dilakukan untuk mereka apakah dipaksa atau ada langkah-langkah untuk PNPM ini, karena PNPM ini ternyata luar biasa loh, dan belum tentu juga di BUMDesMa nanti juga bagus gitu, *nah* itu perkembangannya seperti apa untuk hal tersebut.

Kemudian selanjutnya, Ibu memberikan data bahwa jumlah BUMDes itu yang berkembang 9, baru tahun 2023 ya, targetnya 9.000, sekarang capaian di tahun 2022 ini sudah 7.661. Dari yang maju maupun yang berkembang ini target Ibu dari dua dari 74 desa ribu lebih ya, 74.000 lebih desa yang ada di Indonesia ini, targetnya berapa, berapa yang Ibu targetkan? mungkin Ibu kan sudah punya *grand design* begitu ya, *grand design* untuk ke depan itu kayak apa untuk BUMDes. Kalau hanya diberikan bantuan 50 juta itu ya apalagi sebelumnya 75 turun menjadi 50, itu mau jadi apa *gitu*, apa untuk dijewel-jewel supaya banyak-banyak titik, *nah* itu maksudnya. Itu kan perlu dipikirkan lebih lebih jauh. Kalau di Dapil saya *enggak* ada ini BUMDes ini, saya lihat tadi *enggak* ada, Bu, punya saya.

Kemudian yang terakhir, Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, tadi sudah saya tandai, *nah*, ini Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa anggarannya turun banget kan *gitu* ya, Pak, ya. Usul saya, saran saya, ini yang untuk desa wisata ini kan Bapak kan ya desa wisata, itu kan hanya berapa? 30 ya, Pak ya? hanya 30, padahal kita memerlukan lebih dari 50, lebih dari 60 lah ya harusnya itu. *Nah*, saran saya, Pak, ini kan ada misalnya Pak, bantu, ini ada anggaran-anggaran yang memang bisa diarahkan ke sana, misalnya peningkatan kapasitas pelaku wisata bagi wisata desa, ini kan bisa dibawa ke sana, dialihkan. Sebenarnya kan untuk desa ini memang perlu dilatih itu, tapi menurut saya itu masih jangka panjang, yang penting masyarakat itu ada dulu

dan desa ini sekarang sudah mulai kreatif kok dengan adanya, apa, wisata desa ini sekarang udah mulai kreatif, kepala desa juga udah mulai kreatif, termasuk mungkin yang perlu juga di arahkan ke sana misalnya pengembangan revitalisasi pasar dan pedesaan, Pak. Dalam kenyataannya pasar di pedesaan itu tidak terlalu ini, apalagi kalau apa ya, pasar desa itu fungsinya hanya pagi setelah itu selesai, sepi dipakai orang-orang duduk-duduk aja sebagian besar begitu saya perhatikan.

Nah, oleh karena itu juga, perlu dievaluasi barangkali juga nanti *monggo* silakan mana-mana yang, mana yang kira-kira bisa dialihkan ke sana sehingga itu mampu untuk membangkitkan, kalau memang tujuan akhirnya itu kan sebenarnya juga menggerakkan ekonomi, wisata desa itu ekonominya berputar di situ dan itu realitanya memang demikian, sekarang sudah banyak orang tidak perlu pergi jauh-jauh tetapi pergi di desa masing-masing. *Nah*, menurut saya inilah yang perlu ditingkatkan sehingga anggaran bisa difokuskan ke sana. Saya *enggak* ngerti ini Pak, anggaran yang 5M, anggota, advokasi dan pendampingan desa dan pedesaan, semua, apa ini *ASEAN Villages networking* ini, saya *enggak* ngerti ini. Kalau memang bisa dialihkan, dialihkan saja, kecuali kalau itu memang PHLN ya, itu mungkin, ini untuk tahun 2024, Pak. *Nah*, *monggo* silakan dikaji kembali menurut saya supaya kalau kita memang tujuannya adalah desa ini untuk wisata dalam rangka pembangunan dan ekonomi dan saya yakin dengan adanya desa wisata *tuh* orang juga bisa meningkatkan ini, Pak, apa namanya berpikiran maju juga, Pak, untuk, untuk hal itu, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Pak Hamka, silakan, Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Dirjen, Ibu Dirjen dan
Seluruh jajaran Kementerian PD TT yang hadir,**

Pertama, saya ingin ke Pak Dirjen Daerah Tertinggal ya Pak ya, bukan desa tertinggal, daerah tertinggal, kabupaten ya? Saya minta data, kabupaten mana di Indonesia yang dianggap oleh PD TT ini tertinggal? SK-nya menteri atau

apakah sebagai bahan Perpres, tolong disebutkan perpresnya nanti sebagai bahan kami untuk mengevaluasi daerah tertinggal itu sudah sampai sejauhmana, sama apa yang disampaikan beberapa tahun yang lalu sebelum Pak menteri ini juga sudah ada SK desa tertinggal awalnya, sehingga SK-nya turun, turun, turun dianggap sudah tidak ada desa tertinggal, *nah*, ini kan perpres ya, oke. Saya minta nomornya nanti disebut sehingga kita mencoba mengevaluasi nanti progresnya, kapan bisa dianggap tidak tertinggal lagi dan apa kriterianya sehingga itu adalah tertinggal, itu yang pertama.

Yang ke Pak Dirjen secara umum saja ya, ini saya hanya khusus untuk Dirjen Daerah Tertinggal detail seperti itu tadi. Secara umum, saya melihat bahwa memang pagu indikatif ini dari 2023 2,99 T, turun di 2024 menjadi 2,76 T, artinya memang terjadi penurunan. *Nah*, kami berharap nanti, Pak, apa yang kita diskusikan tadi itu, kami di DPR juga bisa melakukan pergeseran *loh*, kalau AA yang tertera di sana *automatic adjustment*, kami punya hak juga untuk menggeser, *gitu loh ya*. Apakah menggeser antara Dirjen itu kewenangan Pak Menteri atas dasar keputusan komisi. *Nah*, memperhatikan ini semua yang salah satu contohnya tadi desa wisata misalnya atau BUMDes, bisa saja nanti Pimpinan nanti kita mencoba menggeser yang juga merupakan kewenangan kami, karena jujur barangkali kita juga memerlukan pendanaan tersendiri untuk membangun daerah kita masing-masing, itu yang penting. Kalau 2,76 anggarannya, barangkali nanti kesepakatan kita bahwa daerah yang menjadi tujuan aspirasi Anggota DPR itu adalah memerlukan pendanaan, itu tentu kita harus bicara dengan Pak Menteri dalam suatu rapat untuk melakukan pergeseran antar eselon.

Nah, saya menyoroti masalah AA tadi. Pertanyaan saya adalah sebelum pagu indikatif terbit SK-nya, tentu seluruh Eselon I dan Pak Menteri melakukan pertemuan tripartit, yaitu Bappenas tentu dengan kementerian Bapak dan Kementerian Keuangan. *Nah*, apakah pada saat pertemuan itu tidak dibahas ya namanya AA ini? apakah AA ini dalam perjalanan baru muncul AA? saya barangkali menyayangkan munculnya AA itu padahal sudah didiskusikan dalam bentuk pertemuan tripartit tadi. Apakah tidak membahas itu? apakah kewenangannya langsung Kementerian Keuangan, AA? tidak ada tanggapan dari kementerian yang bersangkutan? memang pekerjaan Kementerian Keuangan itu me apa namanya menyesuaikan seluruh anggaran dan menggeser beberapa anggaran sehingga hampir semua kementerian itu ada *automatic adjustment* atau yang kita istilahkan AA tadi. Bagi saya sebenarnya sangat apa ya, kenapa harus terjadi belakangan itu AA? kenapa tidak sekalian bahwa sekian aja anggaran tidak usah pakai AA, *gitu loh?* ini namanya PHP, harapan palsu itu *loh*, ini yang akan saya sampaikan nanti di Badan Anggaran itu *loh* dan itu pun saya sudah singgung sebenarnya. Jangan kasih PHP kepada kementerian *dong*, AA muncul itu dalam proses perjalanan karena menyesuaikan anggaran, ya memang 2024 itu, Pak, anggarannya memang agak sulit-sulit, gampang-gampang susah, belum apa-apa Kementerian BUMN sudah minta PMN 57,9 triliun, belum apa-apa, masih pagi, *gitu loh*.

Oleh karena itu, sebenarnya saya ingin mencoba menanyakan kepada Bapak, apakah pada waktu pertemuan tripartit itu tidak dibahas? kenapa tidak

didiskusikan? karena pengalaman kita kalau, ini AA ini bukan hanya tahun ini, 2022 juga ada AA juga, Pak, tapi kita bisa maklumi karena ada yang namanya Covid. Sekarang ini kalau AA mau dimunculkan lagi sekarang apanya lagi *gitu loh*, itu kebiasaan Menteri Keuangan itu ya spontan *automatic adjustment*, kalau *automatic* ya lebih bagus kurangin aja, *ngapain* susah-susah bawa AA *gitu loh* yang merepotkan. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pertemuan selanjutnya karena ini baru pagu indikatif, ini pembahasan pendahuluan, berarti tolong disampaikan Pak Menteri atau Pak Dirjen pada waktu pertemuan dengan Bappenas dengan Kementerian Keuangan tolong disampaikan itu

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, Pak Sekjen, oh Pak Dirjen.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Ya, Pak Dirjen, Pak Dirjen itu apa? Pak Dirjen teknis, Pak Ketua, Dirjen-Dirjen ini dipanggil ke Bappenas, Pak, untuk mengecek itu, dia tripartit dengan Kementerian Keuangan, ya Pak Dirjen ya? benar? kalau Sekjen itu sebenarnya dia koordinatif sifatnya, dia hanya memperjuangkan juga bidang kesekretariatannya dengan Bappenas.

Nah, ini yang saya titipkan, Pak. Tentu kami berharap pertahankan yang menjadi aspirasi anggota karena itu juga dilindungi oleh undang-undang *gitu loh*. Saya paham, Pak, memang agak sulit Bapak menyampaikan kepada Bappenas ya, karena Bappenas juga yang akan menentukan, pagu indikatifnya juga sudah ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, Pimpinan. Jadi kita juga mempunyai apa namanya kewajiban pada konstituen kita, daerah pemilihan kita sesuai dengan Undang-Undang MD3 yang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Kami punya hak juga kalau misalnya cuma contohnya tadi 30, sedangkan kami 50, kami punya hak untuk menggeser *dong*, Pak Pimpinan, kita semua punya hak untuk menyampaikan, oke kita geser dari eselon ini ke eselon ini.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat pembahasan pendahuluan ini membawa apa namanya, pemikiran-pemikiran kita tersendiri dan *Insyallah* bahwa tahun anggaran yang terakhir ini dalam periode kami, inilah pembahasan terakhir anggaran pada periode kami, karena itu akan selesai kami nanti pada bulan-bulan Oktober dan mudah-mudahan masih bisa berlanjut teman-teman yang ada di sini.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wabillahitaufik walhidayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Hamka.

Bu Cen silakan Bu Cen.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen, Bu Dirjen, dan
Seluruh jajaran,**

Saya ke Pak Dirjen PPDT. Pak Dirjen, saya lihat di Tahun Anggaran 2023 ada 5 halaman ya, *progress* pelaksanaan kegiatan prioritas Ditjen PPDT. Saya ingin menanyakan, kegiatan prioritas itu indikatornya seperti apa ke PPDT-nya? karena apakah daerah T, 3T itu termasuk tidak, karena seharusnya daerah T itu tertinggal, terluar itu kan masuk, tetapi sampai hari ini saya tidak melihat ada program Pak Dirjen satupun di daerah 3T. Jadi saya minta penjelasan, juga ada beberapa kegiatan ini, kegiatan ini tidak disampaikan atau tidak diberikan kepada Anggota Dewan, agar Anggota Dewan bisa mengusulkan contohnya ada desa berbasis pengembangan internet desa, itu kan sebenarnya teman-teman Anggota kan juga perlu, apalagi seperti saya di daerah 3T. Jadi apakah ini diusulkan atau dipilih dari mana. Saya rasa program-program ini yang ada di daerah tertinggal ini banyak juga yang diperlukan, apakah Anggota berhak mengusulkan atau Bapak memilihnya dari mana? Jadi saya perlu jawaban seperti itu ya, Pak Dirjen.

Kalau untuk Bu Dirjen dan Pak Dirjen apa, BUMDes dan desa wisata aman-aman saja, sudah dalam pelaksanaan bahkan sudah mau ada pelatihan, terima kasih Pak Dirjen sama Bu Dirjen ya.

Terima kasih, Pimpinan. Itu saja.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Cen.

Masih ada, Pak Willem? cukup? Pak? Cukup ya?

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Boleh, Ketua? ada sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Baik.

Pertama, kami tentu memberikan apresiasi kepada kinerja para Dirjen dari Kementerian PDT Transmigrasi dan terkait dengan pendalaman ada berapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, terkait dengan dalam poros penghubung antar desa itu di daerah kami, untuk di 10 kabupaten di Papua Pegunungan sekarang jadi satu provinsi, dengan hadirnya DOB baru sehingga hari ini memang di sana masih jauh dari sentuhan program dari Kementerian Desa PDT Transmigrasi. Oleh karena itu, kiranya bisa menjadi perhatian terutama terkait dengan pembangunan jalan antar desa, itu di Kabupaten Tolikara, Membramo Tengah, Kalimo dan Langit Jaya dan juga terkait dengan air bersih, itu yang bisa dapat kami sampaikan. Dan untuk Direktur Jenderal Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, ingin kami mau sampaikan usulan program, Pak Ketua.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Willem. Ya.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Pak Ketua, saya mau.

KETUA RAPAT:

Oh, ada usulan, silakan, silakan melalui Pak Hamka dulu, Pak Hamka juga mengantar, tolong fotonya, tukang fotonya tolong. Ke Dirjen mana ini ke Dirjen mana? Dirjen mana?

Oke. Sukses Pak Willem ya.

Baiklah.

Demikianlah penyampaian paparan atau tanggapan para Anggota yang terhormat, sekarang kita serahkan tanggapan langsung dari para Eselon I.

Silakan, Pak Gito duluan.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota,

Izin, kami mencoba menanggapi sekaligus nanti mohon untuk diluruskan kalau apa yang kami sampaikan kurang tepat, baik yang disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu dan Pak Hamka. Jadi izin untuk terkait dengan *automatic adjustment* itu hadirnya atau munculnya itu setelah pagu definitif, Pak, jadi setelah tripartid. Asumsinya adalah bukan karena kegiatan itu penting atau tidak penting tetapi ketersediaan anggaran secara APBN itu ada yang karena harus apa ya, saya membahasakannya itu adalah yang karena pada posisi saat ini dari 234 misalnya tadi, karena sementara yang tersedia karena ini harus di *automatic adjustment* karena ketersediaan anggaran nasional, apa, APBN-nya tidak sampai itu. Jadi betul kalau bahasa saya, saya sepakat dengan bahasa Pak Hamka, jangan mem-PHP karena memang pada posisi di perjalanan memang ada yang bisa, kemungkinan dibuka, tapi sampai pada akhir tahun anggaran pengalaman di 2022 kemarin juga memang sampai pada akhirnya tidak terbuka.

Jadi, mohon maaf Bu Sri bukan persoalan ini kegiatan ini yang penting, tidak penting atau katakanlah *confused double* dengan yang lain tidak, tapi karena kemudian dari angka segitu kemudian kita ini mungkin terkait dengan penerimaan negara, Bu sehingga posisi di kami, di kementerian kami tinggal anggaran yang terjadi sekian.

Nah, yuk, kami diminta untuk menyesuaikan, dalam posisi yang sulit itu kemudian kami mencoba me-*exercise* ya terpaksa yang dengan posisi tadi kami meng-*automatic adjustment* kegiatan yang 1, 2, 3 seperti tadi. Jadi bukan persoalannya, kegiatan ini bukan soal yang penting dan tidak penting sebenarnya, mohon maaf.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Jangan penting dan tidak penting, prioritas dan tidak prioritas.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Oh baik, baik *nggih*, prioritas dan tidak prioritas.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Semua anggaran kan penting, Pak.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Betul, karena kalau tidak penting pasti tidak disetujui pada saat tripartite, Bu.

Kemudian terkait dengan penggeseran tadi, kami, coba kami akan kami *exercise* lagi, Bu. Misalnya tadi yang dikatakan untuk peningkatan kapasitas yang untuk diarahkan kepada fisik, namun untuk yang kegiatan yang advokasi dan kerja sama, Bu, sebagaimana kami laporkan di saat kami paparan tadi, bahwa dengan ketentuan ASEAN ini dan salah satunya adalah Kementerian Desa itu sebagai *vocal point* di kegiatan terkait dengan kemiskinan di ASEAN sehingga kami harus mengawal terkait dengan ASEAN *Village Network* tadi yang merupakan, menurut saya ini adalah sebuah diplomatis, diplomatik yang cukup strategis untuk menyampaikan poin-poin penting kaitan dengan strategis terkait dengan pembangunan desa dan pedesaan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, Pak ya, sebentar dulu, Pak ya, saya apa namanya, tidak bisa diwakilkan.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Oh siap, siap.

KETUA RAPAT:

Nanti Pak Hamka sebentar.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Siap, Pak Hamka, selamat, siap, *inggih*.

Izin, kami lanjutkan, ya, menurut saya strategis karena kita juga untuk menyampaikan pada forum ASEAN ini untuk berbagi pengetahuan, berbagi keberhasilan untuk di tahun 2023 ini kita mengangkat tiga tema, yakni terkait dengan produk unggulan atau *one village one product*, yang kedua adalah desa wisata dan yang ketiga adalah terkait dengan desa digital. Dan ini keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh desa-desa kita. Ini kita coba diawali di tahun yang lalu Bu, kita lakukan di kebetulan di Bali dan kita lakukan langsung di desa dan ternyata mendapatkan antusiasme dari sesama Anggota ASEAN. *Nah*, inilah di tahun 2023 sebagaimana disepakati para pimpinan negara di Labuan Bajo kemarin sehingga ini menurut saya adalah tetap untuk bisa. Siap, tapi artinya sepakat untuk kita untuk lakukan *exercise* kembali, Bu, Bu Sri.

Mungkin saya pikir itu terima kasih, Bu Sarce, kami coba cermati juga yang tadi...

F-P. GOLKAR (CEN SUI LIAN):

Bu Cen.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Eh, Bu Cen, mohon maaf, sampai saya lupa Bu, siap Bu, terima kasih nanti untuk yang di Dapilnya Ibu kami cermati juga, terima kasih.

Demikian, Pak Pimpinan, Pak Hamka, saya kembalikan.

**DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT
TRANSMIGRASI RI (Ir. HARLINA SULISTYORINI, M.Si):**

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Izin, Bu Sri yang terkait dengan BUMDes. Yang pertama terkait dengan target kinerja Ibu, memang di dalam RPJMN sampai 2024 itu kami mendapatkan tugas untuk istilahnya BUMDes berkembang bisa sampai 10.000, kemudian BUMDes majunya 1.800, sedangkan BUMDes Bersama berkembang 300, BUMDes Bersama maju 200. Memang Bu, kalau kami melihat dari APBN yang ada tentu akan susah kami atau kami ada kesulitan sehingga kami menggandeng semua *stakeholder*, Ibu. Jadi kami laporkan di sini kami sudah tiga tahun ini bekerjasama dengan BRI melalui Desa Brilian, Ibu. Kami hampir tiap tahun sudah memberi, menyampaikan kepada bupati dan walikota untuk mengusulkan desa-desa yang memang potensial masuk ke dalam programnya BRI melalui Desa Brilian.

Nah, ini sudah hampir 2.000 desa, sudah terlibat di dalam Program Desa Brilian. Ini juga salah satu upaya kami untuk mempercepat atau meningkatkan kinerjanya BUMDes, karena salah satu indikator yang kami minta ya peningkatan status BUMDes itu, Ibu. Kemudian selain dengan desa, dengan BRI melalui Desa Brilian, kita juga bekerjasama dengan pihak lain misalnya dengan Astra, Desa Brilian, Desa Brilian, Bu. Kalau Desa Brilian programnya BRI Bu izin, BRI, BRI. Jadi kita kerjasama dengan BRI untuk mengembangkan Desa Brilian itu, Bu. Jadi di dalamnya pakatnya ada dari bantuan BRI, kemudian mantri-mantri BRI itu, Ibu, yang membantu.

Kemudian untuk yang dengan swasta kita ada Desa Sejahtera Astra, Bu. *Nah*, untuk yang Desa Sejahtera Astra ini bahkan kita sudah sampai ke tujuan ekspor, jadi desa-desa yang potensial untuk ekspor dikawangi atau dikawal oleh teman-teman dari Astra, dan ini sudah 3 tahun juga, sudah di hampir 1.000 desa yang terlibat, tapi memang untuk yang potensial ekspor masih belum banyak, Ibu. Tiap tahun ini kita programnya *piloting* sekitar 10 sampai 15 desa ekspor.

Kemudian berikutnya, yang kedua, yang terkait dengan informasi untuk yang SPNPM, Ibu, kami izin melaporkan bahwa memang posisinya kami pada

saat *database* yang ada SPNPM ini ada di 5.300 kecamatan, yang sudah bertransformasi ada di 1.433, Ibu, dan total asetnya 7,8 triliun. *Nah*, ini memang semuanya masih berproses Ibu dan di dalam regulasinya memang dinyatakan atau diminta untuk dua tahun berproses menjadi BUMDes Bersama dan ini terus kami lakukan pendampingan.

Mungkin itu Ibu dari kami.

Terima kasih.

INTERUPSI F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Pimpinan, interupsi, sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Saya nyambung dengan penjelasannya Ibu Dirjen tadi. Pertanyaannya Ibu Sri itu maknanya adalah yakin *enggak* transformasi yang sudah terjadi, itu fisik yang diserahkan itu fisiknya ada apa *enggak*? karena setahu saya bahwa setelah dilakukan transformasi itu harusnya secara fisik dana itu ada, karena data banyak yang menunjukkan ada yang sifatnya simpan pinjam, itu sudah tidak balik-balik, hanya catatan saja, ini menjadi *warning*, menjadi catatan tersendiri, Bu Dirjen, jangan sampai memindahkan penyakit itu dari yang lama ke BUMDesMa yang kita bangga-banggakan. Itu catatan saya, Bu Dirjen ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut.

DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. HARLINA SULISTYORINI, M.Si):

Sedikit, Pak Hamka.

Jadi memang berdasarkan arahan Bapak saat itu, kami juga melakukan komunikasi, koordinasi dengan semua dinas PMD provinsi dan kabupaten dan kami sudah melakukan pemetaan dan kita memang meminta bantuan mereka untuk *me-review*, Pak. Jadi ketika mereka masuk menjadi BUMDes Bersama, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir semua kekhawatiran kita dan termasuk kita bisa mendata aset-aset yang memang dijadikan sekarang menjadi asetnya BUMDes bersama. Izin itu, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak, silakan Pak Dirjen.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pak, Izin, izin Pak, sebentar, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh ya, silakan.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Ibu, kalau mungkin prosesnya ini kan memindahkan saja, yang pertama mesti pemindahbukuan, kemudian yang kedua cek lapangan. *Nah*, ini hasil ceknya seperti apa antara riil dengan catatan ya, Pak ya. Yang sebenarnya seperti apa? kendalanya apa dari Ibu yang sudah melaksanakan.

KETUA RAPAT:

Ibu, lanjut.

DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. HARLINA SULISTYORINI, M.Si):

Jadi memang Ibu, ada beberapa yang memang ada deviasi ataupun ada perbedaan antara riil dengan data di lapangan, kemudian karena kami meminta bantuan tadi Bu, *review* inspektorat sehingga kita paling tidak apa yang dilaporkan dengan kondisi fisik itu tidak beda jauh, Bu, tapi nanti kami ada aplikasi, Bu, izin kalau memang diperkenankan kami nanti memberikan datanya secara tertulis kepada Ibu, karena kami juga punya aplikasi khusus untuk BUMDes Bersama.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Ginting, silakan Pak Ginting.

DIRJEN PERMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. DANTON GINTING, M.M.):

Terima kasih.

Izin menjawab yang ditanyakan oleh Bu Sri, terkait dengan tabel contohnya di nomor 133 RTJK ada dua, 10 unit, 10 unit tapi harganya berbeda. Izin, Ibu ini memang nanti kami tambahkan lagi penjelasannya. Kalau yang di baris kedua itu sebetulnya yang kena *automatic adjustment*, Bu, yang RTJK 10 unit itu, Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga. Kalau di baris pertamanya yang tersedia, terus yang baris keduanya 10 unit itu sebetulnya yang 350 jutanya itu masih dalam tahap blokir, Bu. Demikian juga dengan Tebas, Tebang, Potong atau TTP, baris pertamanya yang tersedia, yang baris keduanya *tuh* yang masih kena *automatic adjustment*, nanti kami coba lebih kasih lengkap lagi, Bu, tabelnya, Bu.

Terus yang kedua, pertanyaan Ibu terkait dengan masih perlukah transmigrasi? mohon izin tentunya kami sepakat masih perlu Bu, masih perlu, secara singkat, kalau izin berkenan, kalau kita bicara transmigrasi kan Ibu-Bapak sekalian, kita bicara pembangunan dua hal satu ruang, yang kedua pembangunan kependudukan, kita bicara ruang. Artinya kita bicara pembangunan dan pengembangan wilayah, kita bicara penduduk, kita bicara kependudukan. Izin, berdasarkan profil migran hasil survei sosial ekonomi nasional BPS 2021, masalah migrasi di Indonesia berkaitan dengan kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Hasil sensus penduduk 2020 memperlihatkan bahwa 56,1% penduduk tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 6,9% dari seluruh luas wilayah Indonesia, data BPS 2021, banyaknya penduduk yang tinggal di pulau Jawa disebabkan karena besarnya kontribusi ekonomi Pulau Jawa ini terhadap Indonesia.

Nah, kemudian selain itu sarana pendidikan, kesehatan dan hiburan yang relatif lengkap di banding pulau-pulau lainnya menyebabkan banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di Pulau Jawa. Migrasi yang mengarah pada satu wilayah kota tertentu akan berdampak pada peningkatan densitas penduduk di wilayah tersebut, dan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, ketertiban masyarakat dan lingkungan. Kalau kita bicara pembangunan wilayah, kita bicara terbentuknya banyak pusat pertumbuhan baru, Bu. Sebagai contoh terbentuknya tiga provinsi baru yang berasal dari daerah-daerah transmigrasi, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Utara, dan terakhir Provinsi Papua Selatan. Demikian juga terciptanya sekian banyak kabupaten dan kecamatan dari daerah-daerah transmigrasi.

Secara singkat itu, Bu. nanti kalau bisa kami berikan satu narasi lebih panjang.

Demikian, Ibu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

**Plt. DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (RAFDINAL, S.Sos., M.T.P.):**

Baik.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi V yang kami muliakan,

Ibu Sri Rahayu ya menanyakan tentang PPDT introspeksi ya, perlu *enggak* kegiatan seperti misalnya pembangunan sarana air bersih yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Jadi Bu Sri ,sebenarnya kami sebenarnya sudah melakukan koordinasi konkret *gitu*, Bu, dengan kementerian/lembaga. Jadi di tahun 2016-2020 yang lalu kondisi covid, kami sudah mengkonsolidasikan 16 kementerian/lembaga untuk keroyokan kepada 60 daerah tertinggal sehingga ada 1.500 program kegiatan pada waktu itu keterlaksanaannya karena covid itu masih 42%. Kemudian di tahun 2021 kemudian, kita sudah mengkoordinasikan sebesar 22 kementerian/lembaga, keterlaksanaannya sudah mencapai 60% *gitu*, Bu. Jadi betul-betul kementerian/lembaga keroyokan, kementerian/lembaga itu ke daerah tertinggal nyata *gitu*, Bu, sehingga target IPM, target indikator makro dan IKK, indeks kumulatif penetapan daerah tertinggal, kenapa disebut daerah tertinggal, itu betul-betul bisa kita capai walaupun anggaran kami kecil *gitu* Bu, koordinasinya konkret.

Termasuk juga kami laporkan juga kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi V yang kami muliakan, bahwa atas koordinasi kami dengan kementerian/lembaga sehingga di tahun 2022 yang lalu ada PMK 208, 2014-2022 tentang dana insentif fiskal, Pak. Ada dana satu triliun dialokasikan untuk 62 daerah tertinggal, Bu, tapi ini masuk pada skema APBD, tapi kami sudah mendata program kegiatan apa saja dilaksanakan sehingga perlu kami laporkan nanti secara tertulis juga Bapak dan Ibu, kami laporkan, bahwa ada kegiatan pembangunan, ada 17 program kegiatan, pembangunan jalan ya dan lain-lain *gitu*, Bu. Jadi dana satu triliun itu dibagi di 60 daerah tertinggal, antara 7 miliar paling kecil dan 23 miliar, dan itu dikhususkan untuk infrastruktur yang dibutuhkan oleh daerah, termasuk juga tentang kemiskinan ekstrim, Bu. Ini akan kami laporkan secara tertulis untuk apa-apa saja 17 kegiatan yang sudah dialokasikan untuk di daerah tertinggal berdasarkan skema APBD dari insentif fiskal. Belum lagi keroyokan kementerian/lembaga di 2022 yang lalu, dari 22 daerah kementerian/lembaga di tahun 2021, tahun 2022 yang lalu menurun 21 kementerian/lembaga, ada 2.200 program kegiatan dan keterlaksanaannya sudah sampai 74% untuk program kegiatan kementerian/lembaga di 62 daerah tertinggal, itu koordinasi konkrit.

Jadi makanya ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sarana bersih, seperti Ibu laporkan tadi, ya intinya kami tentu ada kegiatan-kegiatan yang kata kementerian/lembaga strategis nasional dan daerah tertinggalnya selalu dari kacamata kementerian/lembaga Satker tidak strategi nasional dan sering

dilupakan, ditinggalkan *gitu* sehingga kami melakukan semacam *pilot project* seperti sarana air bersih yang di kabupaten apa Rote Ndao 2022 yang lalu sehingga dia menjadi semacam dan ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan apa, dan termasuk juga kalau dibutuhkan pihak ketiga tentu di proses lelang dan lain-lain *gitu*, Pak, itu contoh yang nyata.

Dan pertanyaan dari Pak Hamka tadi, apa dasar penetapan daerah tertinggal ya. Pak Hamka yang kami hormati, bahwa ini bukan hanya serta merta di tahun 2020 saja penetapannya, Perpres 263 Tahun 2020 tentang Penetapan 62 Kabupaten Daerah Tertinggal. Sebelumnya ditulis sejak tahun 2024 yang lalu, ada 199 kabupaten daerah tertinggal, di tahun 2009 entas 50 daerah tertinggal dan ada DOB 34 daerah tertinggal sehingga ada menyisakan periode 2009-2014 ada 183 daerah tertinggal. Kemudian di tahun 2014 entas 70 ya, kemudian ada DOB antara 2014 sampai 2019 ada 122 daerah tertinggal, 2019 yang lalu sudah entas 62, ada kabupaten yang Manokwari Selatan dan Arfak yang tidak masuk dalam daerah tertinggal, kita di kementerian/lembaga di pusat diakhirnya mengangkat daerah tersebut dan akhirnya masuk. Jadi artinya jadi harusnya di 122 kurangi 62 tinggal 60, 2 kabupaten kita tambahkan lagi, berdasarkan kementarian/lembaga kesepakatan itu di pusat sehingga ada 60 daerah tertinggal dan target 2024 yang akan datang minimal kita bisa mengurangi 25 daerah tertinggal, sisanya 37.

Jadi, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari 400 kabupaten seluruh Indonesia, 244 itu sebagai daerah tertinggal entas dan daerah tertinggal saat ini. Sama senada dengan pertanyaan Ibu Cen tadi untuk di Kepri *gitu*, Bu, kita punya daerah tertinggal entas di daerah Natuna dan Anambas itu, dan itu sudah entas di tahun 2009 yang lalu *gitu*, Bu, secara hitung-hitungan indeks komposit kumulatif, indikatif, apa, kalau secara hitungan kuantitatif *gitu*, Pak, ada 6 kriteria dan 22 indikator penetapan, itu harus sudah kita lakukan, Bu. Jadi secara tertulis kami akan melaporkan nanti secara lengkap, secara detail dan berkenan nanti tentu arahan, masukan dan penyempurnaan dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi V yang kami muliakan.

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Pimpinan, sebentar Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu Cen.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Nah, Pak Dirjen, maksudnya tahun 2000 berapa 2009?

**Plt. DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (RAFDINAL, S.Sos., M.T.P.):**

Ya.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Bapak mengentaskan daerah tertinggalnya di Natuna, dengan anggaran berapa?

**Plt. DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (RAFDINAL, S.Sos., M.T.P.):**

Anambas di Natuna itu

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

2019 atau 2009?

**Plt. DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (RAFDINAL, S.Sos., M.T.P.):**

2014, Bu, mohon maaf.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

2014 sampai sekarang udah 8 tahun? benar? dan apa yang Bapak lakukan di sana? *Nah*, karena sampai saat ini 3T itu masih tertinggal, *enggak* ada dengan pengentasan itu sudah selesai artinya, dan itu sudah berapa tahun yang lalu. *Nah*, sekarang ini kalau Bapak ke sana masih banyak. Jadi maksud saya apa yang bisa kita berikan lagi, jangan sekali dikasih 8 tahun yang lalu sudah dianggap selesai ya.

**Plt. DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (RAFDINAL, S.Sos., M.T.P.):**

Ya, baik, Bu, baik, Bu.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Dan program-program itu apakah kita bisa menyampaikan, contohnya internet desa, kalau bisa akan kita ajukan juga.

Jadi itu aja, Pak Dirjen.

Terima kasih, Pimpinan.

**Plt. DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (RAFDINAL, S.Sos., M.T.P.):**

Izin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

**Plt. DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (RAFDINAL, S.Sos., M.T.P.):**

Jadi internet desa ini adalah merupakan koordinasi kita dengan Bakti Kominfo. Jadi kita sama-sama menentukan kemudian kita coba pastikan, ini konkret dan kita kawal pelaksanaannya. Jadi kalau Ibu berkenan untuk di daerah Natuna dan kepulauan tersebut, artinya mungkin karena kami dibatasi oleh Perpres 63/2020 tentang 62 Daerah Tertinggal yang menjadi lokus kami, tapi kami akan koordinasikan nanti, kami bantu nanti dengan Bakti Kominfo *gitu* Bu Cen, sekian.

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Siap, Pak Dirjen, asal nanti jangan kita kena yang seperti itu ya, oke.

KETUA RAPAT:

Oke, cukup ya?

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Masih ada, silakan, silakan, Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Terkait mengenai daerah tertinggal, ini ada isu di luar sampai sekarang ini saya belum mendapatkan infonya bahwa ada anggaran Bapak sebut tadi satu triliun ya, ada anggaran satu triliun untuk infrastruktur terhadap daerah tertinggal, sementara saya telusuri sekarang apa memang ada di Bapak atau di kementerian lain? karena ini banyak desa-desa atau daerah-daerah tertinggal menanyakan itu, mungkin ada info? Silakan.

Terima kasih, Pimpinan.

**Plt. DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (RAFDINAL, S.Sos., M.T.P.):**

Baik, Bapak Hamka.

Pak, izin Pak Ketua, kami respon. Baik, Pak Hamka. Jadi dari PMK 208/2022 ada dana insentif fiskal untuk khusus 62 kabupaten daerah tertinggal, dan totalnya 1 triliun, Pak, dan ini dilaksanakan pada 17 program kegiatan di 62 daerah tertinggal, seperti pembangunan jalan dan jembatan, dan ada 17, nanti kami laporkan begitu, Pak, dan ini sudah terbagi habis dan ini koordinasi kita juga dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK dan termasuk juga dukungan pada daerah sehingga kemarin, Pak Hamka, harusnya di tanggal 20 Juni itu kalau seandainya satu daerah saja yang tidak menyampaikan rencana penggunaan dana, kalau tidak disampaikan itu dana hangus. Jadi *alhamdulillah* 60 daerah tertinggal, detik-detik terakhir tanggal 20 kemarin *alhamdulillah* sudah melakukan *entry input* data di aplikasi apa, di aplikasi Kementerian Keuangan, kemudian juga sudah di-*approve* oleh Kementerian Keuangan dan kita sifatnya koordinasi, Pak Hamka. Intinya memastikan atas kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan itu, Pak, dan *Insyallah* kalau seandainya ke depannya *nih* khusus untuk daerah tertinggal, 62 dan kalau seandainya di seperti Pak Willem ya, di pegunungan sana, itu ada beberapa daerah tertinggal, kemarin juga sama Kabupaten Teluk Bintuni, Pak, agak lambat *gitu*, Pak. Nanti kalau ke depannya nanti dibutuhkan misalnya kita bersama-sama ke daerah dan mengajak Pak Willem untuk bisa sama-sama untuk sosialisasi dan melakukan monitor evaluasi, *Insyallah* mungkin perkenan waktunya nanti Pak Willem.

Terima kasih.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Ini sebaiknya ada koordinasi penyampaian kepada kami, Pak, daerah mana dan sumber anggarannya itu satu triliun siapa yang lakukan? sampai sekarang ini hanya angin, angin, angin suara angin saja yang kami dengar di Komisi V, menyebut lagi infrastruktur. Tadi saya ditanya wartawan, saya juga baru tahu bahwa ada satu triliun, sumber dananya dari mana, yang laksanakan siapa, ini tidak jelas di Komisi V, Pak Ketua, ini *loh* sehingga pertanyaan-pertanyaan daerah tertinggal, namanya transmigra, apa namanya Daerah, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal tentu menjadi pertanyaan, Tupoksinya ini siapa? Ini baru saya tahu juga bahwa sifatnya koordinatif, yang melaksanakan siapa? Ini kan pertanyaan saya yang harus dan daerah-daerah

mana yang kena, yang satu T itu. Ini Pimpinan, saya mungkin harus kita kaji dan minta datanya agar supaya kami jangan buta juga persoalan itu karena ini infrastruktur daerah tertinggal lagi.

Makasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, saya kira itu menjadi perhatian, Pak, ya apa yang disampaikan Pak Hamka, saya kira tidak perlu jawab lagi, tinggal diberikan datanya kepada kita semua ya.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Sedikit dari saya.

Terima kasih, Pak Dirjen.

Memang kami selama ini selalu merindukan kebersamaan kami dengan mitra untuk turun ke daerah supaya jelas bagi kami dalam hal memberikan perhatian adalah, terutama dalam hal penentuan daerah, daerah terkait dengan mana daerah maju, daerah, desa maju, desa tertinggal, desa menengah, mestinya itu harus dapat perhatian dari kami Komisi V. Kalau sekiranya selama ini hanya dilakukan oleh teman-teman Kementerian Desa, itu tentu akan mendapat sorotan dari kami sebagai presentasi masyarakat yang ada di daerah kami masing-masing. Seperti halnya di sini, di Dapil saya itu listrik aja *enggak* ada, apalagi telepon, *enggak* ada, jalan dari antar desa atau dari kabupaten ke kecamatan, ke desa-desa harus pakai pesawat. Jadi semua kriteria dicantumkan itu kita tidak memenuhi syarat. Kalau dilakukan seperti itu maka kami akan selalu diabaikan, dilupakan, karena tidak memenuhi semua kriteria yang dibuat tidak memenuhi, *enggak* masuk *gitu*, kenapa? karena memang di sana selain itu juga, terus juga dipengaruhi oleh di sana kita *enggak* ada lapangan kerja. Selama sekian tahun selesai orang selesai sekolah hanya mengharapkan jadi PNS, sementara PNS pun setiap tahun belum tentu ada peluang untuk setiap orang bisa punya peluang untuk jadi diterima sebagai ASN, *gitu*. Sementara daerah lain mungkin peluang sangat menjanjikan, katakanlah di Jawa, semua orang se-Indonesia datang ke Jawa, karena semua lapangan kerja terjadi, tersedia di sini, entah mau jadi ASN, mau jadi CPNS, semua harus di sini sehingga kalau kriteria yang buat itu apa sepihak, kami akan di luar pulau akan selalu diabaikan, dan semua akan terserap di sini, dan per tahun APBN itu 60% akan selalu terserap di Jawa. Di luar pulau hanya 40%,

karena itu sinergitas dan kerja sama antara Anggota, Pimpinan dari Komisi V kiranya menjadi perhatian.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mau ada komentar sedikit, Pak?

Plt. DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (RAFDINAL, S.Sos., M.T.P.):

Baik, ya terima kasih Pak Willem, Pak Hamka.

Intinya Pak Hamka, pertanyaan Bapak tadi anggaran dari Kementerian Keuangan, Pak, masuk kepada skema APBD, APBD kabupaten daerah tertinggal, Pak, dana transfer ke daerah *nih*, Pak.

Makasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Willem.

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Pak Willem, saya terus terang ya walaupun sering WA Bapak terus skema insentif fiskal saya sudah lapor sama Bapak, karena nomor Bapak sudah ada sama saya, itu sudah menjelaskan bagaimana proses tahap penyaluran tahap 1, tahap 2 untuk, dan kegiatan-kegiatan apa saja untuk kegiatan-kegiatan alokasi yang satu triliun ini, Pak. Jadi ada 17 kegiatan yang terbesarnya adalah pembangunan dan peningkatan jalan *gitu*, Pak, termasuk juga ada pembangunan jembatan, pembangunan rumah layak huni, pembangunan sarana air bersih, pembangunan fasilitas layanan publik dan ada 17 program kegiatan dan sudah ada anggarannya, Bapak. Mohon izin, Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya. Cukup Pak Willem ya?

Saya ada pertanyaan sedikit saya. Itu tadi uang yang di, yang SK kan itu adalah Menteri Keuangan ya, yang kode 08, kemudian dikirim ke kabupaten masing-masing, dikelola oleh kabupaten, itu atas usul siapa?

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Pak Ketua, Bapak dan Ibu anggota Komisi V yang kami muliakan,

Kami dalam rangka meng apa, menyusun rencana aksi nasional T-2 itu kami selalu komunikasi dengan daerah, memastikan kebutuhan *long list* kebutuhan PPDT apa *gitu*, Pak, sehingga pada waktu kami melakukan diskusi dengan daerah dan provinsi ini mengajak teman-teman dari Ditjen Bangda, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko PMK. Di sana mereka mendapatkan bahan *gitu*, Pak, hasil itu, kemudian di T-1 sebelum penetapan RAN itu, kita mengajak berkumpul atau mengundang kementerian, Biro Perencanaan kementerian/lembaga, sehingga itu bisa menjadi (suara kurang jelas).

KETUA RAPAT:

Atau disektornya *anu*, sektornya PDT?

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Kita lebih pada koordinasi saja bahwa ini loh kesenjangan

KETUA RAPAT:

Yang berinisiatif siapa? yang berinisiatif siapa?

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Kementerian Keuangan, Pak.

KETUA RAPAT:

Kementerian Keuangan berinisiatif.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Ya, atas koordinasi kita selama ini *gitu*, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi, kalau Anggota Komisi V mendapatkan angka seperti itu bisa melalui siapa kita? Bisa melalui PDT menyampaikan itu sehingga bisa masuk dalam program itu *gitu*.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Karena ini posisinya masuk ke skema APBD, APBD dan ini menjadi dana transfer, nanti mungkin kami akan mencoba konsultasi dan tentu segera melapor dengan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bukan, masalahnya begini. Ada kan kemungkinan kita turun lapangan, kita mendapatkan juga hal yang seperti itu.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Siap.

KETUA RAPAT:

Terus Anggota Komisi V menyampaikan kepada Bapak sebagai Dirjen, ya, Dirjen berkoordinasi dengan semua yang terkait tadi *gitu*, bahwa dia mau turun ke kabupaten ya silakan, tidak ada persoalan ya. Yang penting bahwa kita menyuarakan suara masyarakat, kebutuhan masyarakat desa di sana *gitu*, karena bisa saja daerah dia melihat karena kan daerah itu melihat persoalan politik juga dia, dia kalau dia melihat bukan pendukung dia tidak bicara, dia tutup diri *gitu*, biar itu masyarakatnya, kalau bukan pendukungnya. Ada orang berwatak seperti itu, ada juga orang berwatak bahwa begitu dia terpilih maka semua menjadi milik orang lain, apa milik semua orang *gitu*, tapi ada yang terpilih bagi yang tidak pilih dia, dia siksa habis-habisan dia.

Nah, apakah bisa anggota DPR Komisi V misalnya turun ke lapangan melihat ada suara seperti itu, kita sampaikan kepada PDT, kemudian kementerian, Ditjen PDT berkoordinasi dengan *anu*, dengan kementerian yang lain, kemudian turun ke kabupaten, apa bisa seperti itu?

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Insyallah, bisa Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bisa ya?

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Ya, oke Pak.

KETUA RAPAT:

Yang itu didengarkan semua Anggota Komisi V yang terhormat.

Terima kasih, sekarang sampai lah kepada apa namanya kepada kesimpulan, tolong di...

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh silakan, silakan.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Ini belum *clear* ini masalahnya, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya silakan, silakan.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Harusnya kan koordinasinya apalagi yang namanya infrastruktur, kecuali dana itu saya akan cek, karena transfer daerah itu ada dalam bentuk DAK, apakah yang dimaksud itu, dana itu untuk DAK-nya kabupaten, itu baru transfer daerah. Saya ragukan itu karena selama ini tiap tahun, apalagi tahun lalu tidak pernah ada nomenklatur seperti itu, yang ada adalah DAK reguler, ada DAK penugasan, yang mana? Apakah dia masuk DAK reguler atau masuk di penugasan-penugasan itu otomatis aspirasi dari Anggota atau DPR atau siapalah aspirasi, *gitu* Pak.

Jadi bingung kita sebenarnya, ini akan juga saya akan tanyakan nanti sebenarnya. Bapak harusnya sebagai koordinator, apalagi itu yang menyangkut pembangunan desa tertinggal, harusnya melaporkan di sini dan mekanismenya seperti apa seperti apa yang disampaikan Pak Ketua, hal ini memerlukan kajian lagi, Pak ketua, barangkali tidak sampai di sini saja, kita sudah dan akan kita diskusikan lebih lanjut, dan ini tolong diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan dasar hukumnya seperti apa dan siapa yang berperan di situ.

Terima kasih, Pak ketua.

KETUA RAPAT:

Saya pikir cukup ya?

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, silakan Bu Sri.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Saya menyambung, bukan menyambung ya, tapi minta ketegasan Pak Sugito.

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Nggih.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Terkait dengan tiga apa, keputusan bersama tadi petunjuk teknis ya.

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Oh nggih. Siap.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Itu yang, sebelum itu saya ingin ketegasan, apakah memang ada atau tidak ada yang anggaran 2 M itu? itu harus jelas itu.

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Ya, baik Bu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Ya, yang kedua, sehubungan dengan SK bersama ya di petunjuk teknis itu ya, SK atau kesepakatan atau apa ini?

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

SK Dirjen.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

SK ya, SK Dirjen, yang tanda tangan Pak Gito ya, apakah itu di-*share* ke semua kepala desa atau mungkin asosiasi atau seperti apa, tolong juga, kebetulan di *share* kemana, tolong sekali lagi di sini di forum ini.

Terima kasih.

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Baik, izin Ketua.

Bu Sri yang saya hormati, Pimpinan,

Prinsipnya Juknis disusun adalah untuk memberikan *guidance* bagi bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa. Salah satunya adalah Juknis terkait dengan bantuan desa wisata di tahun 2023, maka SK tersebut ditetapkan sebagai Juknis panduan misalnya pada (suara kurang jelas) ada 152 lokus, maka kepada 152 lokus tadi kepada desa, dan kita *share* hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks hal ini adalah yang terkait di dalam pengelolaan bantuan desa wisata, yang pertama adalah kepala desa, yang kedua adalah pemerintah daerah dan kami yang ada di desa. Artinya ini menjadi panduan maka memang kami nge-*share* nya ada bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, jadi ada pertemuan.

Nah, kami memang tidak, mohon maaf tidak bisa menjamin apakah itu mereka akan disebarakan dikasihkan orang lain atau tidak, kami tidak bisa menjamin, tapi kami pastikan dari kami tidak melakukan kepada pihak-pihak lain di luar yang memang berkepentingan tadi. Itu yang pertama Ibu, *nggih*.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Artinya tidak ada perintah untuk, Pak, izin Pak, tidak ada perintah untuk membuat usulan tentang, itu Pak ya.

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Apalagi, mohon izin, apalagi kami menawarkan di luar kemampuan yang ada. Jadi misalnya, kami memahami apa yang, karena dinamika di lapangan juga nyampe ke kami, ternyata ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan kondisi di kami, ada dua modus, mohon izin yang, yang sering muncul ke kami, modus yang pertama adalah mereka menyampaikan seolah-olah akan ada bantuan yang nilainya cukup besar antara satu sampai dua M. Kemudian oknum yang tidak bertanggung jawab ini mendatangi ke berbagai, bahkan sampai mengumpulkan, bahkan mohon maaf keberaniannya ini kadang sampai berkoordinasi dengan pihak kecamatan, pihak Pemda, tetapi dalam tanda kutip adalah hanya orang tertentu. *Nah*, kemudian menawarkan untuk menyusun

proposal tertentu, kemudian dengan meminta jasa tertentu terkait dengan penyusunan ini tadi, dan itu kami pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan itu dan kami tidak pernah menawar-nawarkan program-program yang sifatnya memang bukan, bukan menjadi kewenangan kami dan kami juga tidak menawarkan kecuali yang memang sudah pada lokus yang sudah ditetapkan, itu yang pertama, Bu.

Modus yang kedua adalah menggunakan modus model pelatihan ataupun rapat tertentu kemudian menawarkan agar melalui EO tertentu, lewat jasa tertentu dilakukan dalam waktunya singkat, biasanya ini modusnya adalah untuk mendapatkan tiket, biaya hotel dan sebagainya karena di situ dimunculkan bahasa nanti akan diganti setelah pada di lokasi, dan di dalamnya ada rapat juga yang mengandung seolah nanti di rapat itu akan ada bantuan, dan itu sudah kami pastikan dan kami juga pernah membuat surat edaran bahkan penegasan, bahwa tidak ada program-program yang semacam itu. Nama saya pribadi pernah dipalsukan, nama Pak Sekjen juga pernah dipalsukan, bahkan SesDitjen saya yang sudah pensiun pun kadang masih digunakan oleh modus-modus seperti ini.

Dan yang ketiga, kami tegaskan sekali lagi, di internal kami tidak pernah kami untuk memberikan arahan atau hal-hal yang terkait dengan di luar yang menjadi batas kewenangan kami.

Mohon izin itu Bu Sri Rahayu, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya nyambung Bu Sri, Bu Sri kejadiannya cuma sekali atau beberapa kali Bu Sri, kejadian persuratan tadi yang di *share* tadi itu, yang di undang-undang seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen? Itu cuma sekali kejadian atau berulang-ulang kali?

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Kalau *share* nya kan karena apa namanya, itu SK ya Pak ya, SK, eh apa namanya, Juknis.

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Juknis, petunjuk teknis.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Itu artinya kan, itu yang di, yang di-*share* ke semua asosiasi, kemudian mereka diminta untuk mengusulkan apa namanya program, desa wisata. *Nah*, makanya saya minta ketegasan, ini memang ada usulan apa *enggak* dari sini, perintah apa *enggak*, jawabnya kan tidak. Artinya kalau tidak berarti itu *enggak*

bener *gitu loh* Pak maksud saya supaya kita yang di daerah ini juga *enggak* kelabakan juga, ini kan kepala desa mesti, Bu ini ada program baru, tolong dibantu, kan mesti *gitu*, Pak, ternyata kan *ndak* bisa, *enggak* ada gitu, itu yang saya maksudkan Pak.

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Izin Pimpinan, menambahkan sedikit, karena memang ini agak masif, Bu, perlu kami tegaskan. Kami pernah mendapatkan laporan ada di wilayah Sumatera, ada juga di Banten, ada di Sulawesi, bahkan ada di Jawa, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk dari Bali sendiri sehingga kami memang kesulitan untuk menghalau ini, tapi kami yang kami tegaskan kepada seluruh jajaran kami termasuk kepada teman-teman pendamping, termasuk pemerintah daerah, agar apabila menemui hal seperti itu segera mengklarifikasi kepada kami, karena, ini mohon maaf memang, bahkan bupati pun ada yang sampai tertipu, Bu, karena sampai ada yang memfasilitasi pertemuannya, Bu, bupati juga, mohon maaf.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, karena seperti yang disampaikan Bu Sri tadi berulang kali, maksud saya begini. Penjelasan Pak Dirjen kan begitu baik ya, begitu baik bahwa itu terdapat apa namanya modus-modus, ada berapa modus tadi yang mereka pakai gitu, ada 3 atau 4 tadi itu. *Nah*, berarti kan sudah diketahui bahwa ada kejadian-kejadian semacam itu, langkahnya kalau saya dengar tadi baru tindakan dalam persuratan disampaikan, belum adakah tindakan-tindakan perlakuan hukum misalnya kepada orang-orang yang melanggar semacam ini, atau sudah ada? agar orang itu ditangkap, dia habis *gitu*.

Silakan, Pak Dirjen.

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):

Izin Pimpinan, karena yang menjadi pihak korban itu adalah berada di daerah, kami menyarankan kepada yang merasa, kan untuk melaporkan, karena kan posisinya tidak di dalam kami, Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan, kan ada juga mencul nama Dirjen tadi, ada yang menjual nama Dirjen, nama Sekjen, apa segala, mencatut, meniru tanda tangannya apa segala, itu kan bisa dicari itu.

**DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA
PDT TRANSMIGRASI RI (SUGITO, S.Sos., M.H.):**

Mohon izin, karena seperti dinarasikan, itu misalnya, saya jabatan saya SesDirjen, kemudian tanda tangannya Bu Ses Dirjen saya yang lama, tapi namanya ada di sana, kan tidak pada posisi, artinya di sini sebenarnya benar-benar palsunya itu sebenarnya nampak kalau mereka yang paham. Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, oke, baik jelas, sekarang sampailah pada keputusan.

**DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAN PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PEDESAAN, PERDESAAN,
DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DIRJEN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN DIRJEN PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RABU, 21 JUNI 2023**

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, di mana capaian per 20 Juni 2023 sebagai berikut:
 - 1) Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, realisasi keuangan dan 29,42%, sementara fisik adalah 30,81%;
 - 2) Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, realisasi keuangan 29,70%, fisiknya adalah 30,95%;
 - 3) Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, keuangan realisasinya adalah 35,96% sementara fisiknya adalah 36,12%;
 - 4) Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi keuangan 25,26%, sementara fisiknya adalah 26,52%.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mengenai rincian program dan alokasi pagu anggaran

untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- 1) Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 601.224.792.000, pagu indikatif adalah 162.214.931.000, *backlog* atau selisih adalah Rp439.009.861.000,00;
- 2) Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pagu kebutuhan tahun 2024 adalah sebesar Rp503.180.560.000,00, pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp224.688.993.000,00, terdapat selisih adalah Rp278.491.567.000,00;
- 3) Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pagu kebutuhan 2024 Rp296.263.131.000,00, pagu indikatif 2024 sebesar Rp75.564.996.000,00, terdiri apa terdiri selisih adalah sebesar Rp220.698.135.000,00;
- 4) Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, pagu kebutuhan 2024 adalah Rp675.709.377.000,00, pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp193.270.994.000,00, terdiri selisih Rp482.438.423.000,00.

Luar biasa ini ya selisih-selisihnya, *backlog*-nya ini besar-besar semua ini, kasihan ini para Dirjen kita dari Pedesaan, padahal pedesaan kita sangat kita butuhkan untuk pertumbuhannya.

3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, untuk menyesuaikan rincian program dan penyempurnaan dan menyempurnakan RKA K/L yang masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPN Tahun 2024 sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Bagaimana Anggota yang terhormat, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Pemerintah? ada koreksi dari pemerintah? setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Dengan telah disepakatinya kesepakatan kita sekarang maka kita sampailah pada penyambutan akhir dari mewakili pemerintah, siapa? Ibu Dirjen? Silakan, Ibu Dirjen.

DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA PDT TRANSMIGRASI RI (Ir. HARLINA SULISTYORINI, M.Si):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,

Terima kasih untuk masukan dan arahnya dan segera akan kami tindaklanjuti segala apa yang sudah menjadi masukan kepada kami.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Dengan selesainya komunikasi antara dua pihak yaitu dari PDT maupun dari Anggota Komisi V yang terhormat, maka saya atas nama Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI, bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Oleh karena itu, rapat kita akhiri dengan ucapan,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB)

JAKARTA, 21 Juni 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002